

Indonesia
Fakultas Sastra
Perpustakaan

92.07

198

S 1.

ed

B/20 2/5d
10/13 4th VS
10/20 24

SEDJARAH
REVOLUSI NASIONAL INDONESIA

Tahapan Revolusi Bersendjata

1945 – 1950

oleh :

Drs SUSANTO TIRTOPRODJO SH

PERPUSTAKAAN
KEMENTERIAN

1966

P.T. Pembangunan Djakarta
Gunung Sahari 84

Cetakan ke-tiga 1966

FAK. SASTRA
Tanggal <u>12-7-69</u>
No. <u>35882</u>

Copyright 1962 pada P.T. Pembangunan

KATA — PENGANTAR

Setelah buku saja jang berdjulud „Sedjarah Pergerakan Nasional Indonesia” (1908 — 1945) terbit dalam bulan April 1962, maka dari beberapa pihak saja menerima permintaan untuk melandjutkan sedjarah itu dengan menulis riwayat Republik Indonesia mengenai djangka waktu 1945 — 1950, jang oleh Bung Karno dinamakan tahapan : „Physical Revolution” (Revolusi Bersendjata) dari Revolusi Nasional Indonesia.

Untuk memenuhi permintaan² itu, maka saja tulis buku ini, tidak dengan maksud menjadikan sesuatu jang bersifat ilmiah kesedjarahan (historis-wetenschappelijk), melainkan hanja sekedar memberikan garis² besar dari Revolusi Bersendjata jang patut diketahui oleh setiap warganegara Republik Indonesia, teristimewa oleh para peludjar Sekolah² Landjutan dan para Mahasiswa tingkat persiapan.

Semoga tudjuun jang sederhana itu dapat terlaksana sekedarnja.

I S I

Kata Pengantar	3
B a b I : Kedjadian ² disekitar Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945	7
B a b II : Usaha Belanda untuk menghantjurkan Republik Indonesia	12
B a b III : Perdjoangan Diplomasi untuk mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia	18
B a b IV : Perdjoangan Bersendjata	29
B a b V : Irian Barat	55
B a b VI : Usaha kearah Konsolidasi Negara	57
B a b VII : Dari Republik Indonesia Serikat kembali ke Negara Kesatuan R.I.	65
B a b VIII : P e n u t u p	67

B A B I

KEDJADIAN² DISEKITAR PROKLAMASI

KEMERDEKAAN 17 AGUSTUS 1945

Pada tanggal 6 Agustus 1945, dengan tidak tersangka-sangka djatuhlah bom atom pertama Amerika Serikat atas kota Hiro-sjima. Panglima angkatan perang Djepang untuk Asia Tenggara jang berkedudukan di Saigon, Djendral Terauchi, yakin bahwa Djepang telah mendekati kekalahannja, pada tanggal 7 Agustus mengeluarkan pernjataan, bahwa Indonesia akan merdeka sebagai anggota dari Kemakmuran Bersama Asia Timur Raja, dan memanggil Bung Karno, Bung Hatta dan Dr Radjiman Wediodiningrat datang di Saigon pada tanggal 8 Agustus untuk menerima petundjuk tentang penjelenggaraan kemerdekaan tersebut.

Pada tanggal 9 Agustus djatuhlah bom atom jang kedua atas kota Nagasaki, sehingga pada tanggal 15 Agustus Djepang menjerah kalah tanpa sjarat, hal mana tidak diketahui Delegasi Indonesia tadi jang pada tanggal 14 Agustus telah kembali di Djakarta, tetapi diketahui benar oleh pemuda² revolusioner kita di Djakarta.

Menurut Adam Malik dalam bukunja jang berdjulud „Riwayat Proklamasi”, maka pada saat itu di Djakarta terdapat 4 golongan pemuda revolusioner jang bergerak setjara tersembunji, ialah :

- I. Golongan Sukarni, termasuk antara lain Kusnaeni, Adam Malik, Panduwiguna, Maruto Nitimihardjo, Armunanto.
- II. Golongan Sjahrir, termasuk Soedarsono, Hamdani, Soepeno.
- III. Golongan Peladjar, termasuk Chairul Saleh, Soebadio, Eri Soedewo, Djohar Nur.
- IV. Golongan Kaigun, termasuk Mr Subardjo, Sudiro (Mbah), Wikana.

Dari empat golongan tadi, terutama golongan Sukarni dan golongan Peladjarlah yang bersikap tegas, sedang golongan Sjahrir masih agakimbang dan ragu² serta golongan Kaigun masih bersikap „mundur-madju“.

Maka pada tanggal 15 Agustus 1945 keempat golongan tersebut mengadakan rapat gabungan bertempat diruangan belakang gedung Bacteriologis Laboratorium di Pegangsaan Timur, dimulai djam 8 malam dibawah pimpinan Chairul Saleh. Rapat memutuskan, supaya Kemerdekaan harus segera diproklamasikan oleh Bangsa Indonesia sendiri, lepas dari tjampur-tangan bangsa asing. Wikana dan Darwis ditugaskan untuk menjampaikan putusan itu kepada Soekarno/Hatta.

Djam 10 malam utusan diterima Bung Karno di Pegangsaan Timur 56, maka djawaban Bung Karno adalah, bahwa penjerahan Djepang itu setjara resmi belum diketahuinja, bahwa Kemerdekaan pasti tertjapai karena telah didjandjikan Djepang dan segala persiapan sudah selesai. Pada saat itu datanglah Bung Hatta, yang menjatakan sebagai pendapatnja bahwa kita harus menunggu herita resmi tentang penjerahan Djepang, dan minta pertimbangan dari Gunseikan dan Soomubutyo tentang djandji Kemerdekaan dari Djendral Terauchi. Djam 11.30 utusan dengan tangan hampa meninggalkan Pegangsaan Timur 56, dan djam 12 tengah malam memberikan laporannja kepada rapat gabungan yang dilanjutkannya digedung Tjikini 71. Rapat memutuskan supaya Soekarno/Hatta dibawa keluar kota, yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Chairul Saleh, Sukarni, Singgih dari Peta, Kunto dan Dr Muwardi.

Djam 4 pagi Sukarni dan Kunto pergi kerumah Bung Hatta, yang dibawanja kerumah Bung Karno, dimana sudah berkumpul Chairul Saleh, Asmoro dan Dr Muwardi. Dengan alasan bahwa semangat rakjat dan pemuda demikian meluapnja sehingga keagaman Bung Karno dan Bung Hatta terantjam apabila masih tinggal di Djakarta, maka djam 4.30 pagi dengan dikawal oleh sebuah mobil escorte dari Peta berangkatlah Bung Karno beserta isteri dan Guntur dalam satu mobil, dan Bung Hatta, Sukarni dan Kunto dalam mobil kedua menudju Rengasdengklok. Ternjata bahwa

Sukarno/Hatta masih tetap bimbang untuk melakukan Proklamasi karena belum ada berita resmi tentang penjerahan Djepang. Maka diutuslah Kunto kembali ke Djakarta untuk mendapatkan berita resmi itu. Djam 4 sore tanggal 16 Agustus Kunto tiba kembali di Rengasdengklok dengan membawa Subardjo SH dan Sudiro (Mbah). Mereka menegaskan bahwa benar Djepang sudah menjerah kalah, atas penegasan mana Dwitunggal sanggup melakukan Proklamasi, akan tetapi harus dilakukan di Djakarta. Mula² Snkarni berkeberatan, namun setelah Subardjo SH mendjamin keamanan Dwitunggal dirumah Laksamana Muda Maeda di Oranje Boulevard (Djalan Diponegoro), maka djam 10 malam semua berangkat kembali ke Djakarta. Djam 12 tengah malam tiba dirumah Maeda, dimana sudah berkumpul Diah, Semaun Bakri, Sajuti Melik dan Iwa Kusuma Sumantri. Kemudian menjusul djuga Chairul Saleh. Sukarni mengadakan naskah Proklamasi jang berbunji :

„Dengan ini rakjat Indonesia menjatakan kemerdekaannja. Segala badan Pemerintah jang ada barus direbut oleh rakjat dari orang² asing jang masih mempertahankanja”.

Dwitunggal menolak naskah itu, karena dengan redaksi itu Djepang pasti akan menghantam rakjat habis-habisan. Achirnja dapat disetudjui naskah Proklamasi jang ditandatangani Soekarno-Hatta pada djam 2 malam dirumah Laksamana Muda Maeda di Djalan Diponegoro dan akan diutjapkan oleh Bung Karno pada esok harinja dgedung Pegangsaan Timur 56.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 telah banjak rakjat berkumpul dihalaman rumah kediaman Bung Karno di Pegangsaan Timur 56, dimana pada djam 10 pagi Bung Karno dengan Bung Hatta disampingnja mengutjapkan Proklamasi Kemerdekaan, disertai dengan pidato singkat seperti berikut :

Saudara² sekalian !

Saja telah minta saudara² hadlir disini untuk menjaksikan satu peristiwa maha penting dalam sedjarah kita.

Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah herdjoang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun !

Gelombangnja aksi kita untuk mentjapai kemerdekaan kita itu ada naiknja dan turunnja, tetapi-djiwa kita tetap menudju kearah tjita².

Djuga didalam djaman Djepang, usaha kita untuk mentjapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-berhenti. Didalam djaman Djepang ini, tampaknja sadja kita menjandakan diri kepada mereka. Tetapi pada hakekatnja, tetap kita menjusun tenaga kita sendiri, tetap kita pertjaja kepada kekuatan sendiri.

Sekarang tibalah saatnja kita benar² mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air didalam tangan kita sendiri. Hanja bangsa jang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri dengan kuatnja.

Maka kami, tadi malam telah mengadakan musjawarat dengan pemuka² rakjat Indonesia, dari seluruh Indonesia. Permusjawaratan itu seia sekata berpendapat, bahwa sekaranglah datang saatnja untuk menjatakan kemerdekaan kita.

Saudara² ! Dengan ini kami njatakan kebulatan tekad itu.

Dengarkanlah proklamasi kami :

Proklamasi

*Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan
Kemerdekaan Indonesia.*

*Hal-hal jang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain
diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang se-
singkat-singkatnja.*

Djakarta, 17 Agustus 1945.

*Atas nama Bangsa Indonesia,
SOEKARNO - HATTA*

„Demikianlah Saudara² !

Kita sekarang telah merdeka !

Tidak ada satu ikatan lagi jang mengikat tanah air kita dan bangsa kita !

Mulai saat ini kita menjusun Negara kita ! Negara Merdeka !

Negara Republik Indonesia, — merdeka kekal dan abadi.

Insja Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu².

Kesimpulan jang dapat kita tarik dari riwayat Proklamasi ialah :

- I. *Kemerdekaan dengan penjataan oleh Djepang tidak mungkin*, karena Djepang terikat oleh djandji jang diberikan pada waktu menjerah, untuk mempertahankan „status-quo” disemua daerah² jang diduduki, artinja tidak akan mengadakan perobahan dalam status daerah² itu sampai menjerahkan kekuasaannja kepada pasukan² Sekutu.
- II. *Pemuda revolusioner telah berdjasa dalam mempertjepat Proklamasi*, karena Pemuda *tidak sanggup melakukan Proklamasi sendiri*, sebab kewibawaan Soekarno-Hatta, terutama dari Bung Karno dikalangan rakjat sedemikian besarnja, sehingga hanja Proklamasi jang dilakukan oleh *Dwitunggal Soekarno - Hatta dan diutjapkan oleh Bung Karnolah jang pasti akan mendapat dukungan dari rakjat seluruhnja*.

B A B II

USAHA BELANDA UNTUK MENGHANTJURKAN REPUBLIK INDONESIA

Politik kolonial Belanda adalah bertudjuan mendjadjah Indonesia untuk selama-lamanja. Untuk mentjapai tudjuan itu dipergunakan dua siasat :

- I. Taktik „Divide et impera” atau „Verdeel eu heers” artinja „memetjah-belah untuk tetap berkuasa”.
- II. Sikap tidak mempertjajai rakjat bumiputra memegang sendjata. Sikap ini terbukti :
 - a. Belanda tidak menghiraukan tuntutan Comité Indië Weerbaar, jang pada tahun 1915 mengirim Delegasi ke Nederland untuk menuntut Inheemse Militie (wadajib militer untuk rakjat bumiputra).
 - b. Belanda pun tidak menghiraukan pernjjataan dari „Kongres Rakjat Indonesia” jang diselenggarakan oleh Gapi (Gabungan partai² politik Indonesia) dalam bulan Desember 1939, bahwa Gapi bersedia membautu Pemerintah Belanda didalam peperangan, jang pada waktu itu telah mendjalar ke Asia, dengan sjarat di Indonesia segera dibentuk Dewan Perwakilan Rakjat jang dipilih langsung oleh rakjat, dan dibentuk pula Pemerintah jang bertanggung-djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat itu.

Akibat dari politik kolonial Belanda itu ialah sikap dingin dari rakjat Indonesia pada waktu Djepang mendarat diheberapa tempat di Indonesia, pada tanggal 1 Maret 1942, sehingga pada tanggal 8 Maret 1942 Pemerintah Hindia Belanda sudah bertekuk lutut.

Untuk mendapat bantuan rakjat dari daerah² jang diduduki musuh, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Sumner Welles menjatakan, bahwa apabila Sekutu menang dalam perang ini, semua bangsa jang terdjadjah akan merdeka. Sama sekali lain dari pernjjataan tegas dari Amerika Serikat itu, maka kesanggupan jang diberikan Ratu Wilhelmina pada tanggal 6 Desember 1942 hanja berupa djandji, bahwa sehabis perang Keradjaan Belanda akan disusun kembali atas dasar kemauan bebas untuk mendjadi peserta dalam Keradjaan susunan baru itu, jang akan terdiri dari Nederland, Indonesia, Suriname dan Curaçao.

Sesuai dengan politik kolonialnja itu, maka setelah Djepang menjerah, Belanda mengira dengan mudah dapat kembali mendjadjah Indonesia dengan membontjeng tentara Sekutu.

Belanda ternjata „ketjelik” dalam pengiraannja itu, karena ternjata tidak mungkin dengan mudah dapat mendjadjah Indonesia kembali.

Adapun sebab-sebabnja ialah :

- a. Mac-Arthur sebagai Panglima Komando Sekutu untuk Asia Tenggara (S.W.P.A. = South West Pacific Area) memerintahkan, bahwa pasukan² Sekutu baru boleh mendarat sesudah penjérahan Djepang dengan resmi ditandatangani, peristiwa mana baru terdjadi pada tanggal 2 September 1945 diatas kapalperang „Missouri” diteluk Tokio.
- b. Tepat pada tanggal 15 Agustus 1945 Komando Sekutu untuk Asia Tenggara pindah dari pasukan Amerika Serikat ketangan pasukan Inggris jang lemah dibawah pimpinan Marsekal Mountbatten, jang memutuskan sechema pendaratannya : pertama Malaya, kemudian Saigon, dan setelah itu baru Indonesia, dengan perintah kepada Panglima Djepang Terauchi, bahwa pasukan² Djepang tetap bertanggung-djawab sampai kekuasaannya dioper oleh pasukan Sekutu.
- c. Marsekal Mountbatten menetapkan pendaratan di Kalimantan, Indonesia Timur dan Nusatenggara, ketjuali Bali dan Lombok, ditugaskan kepada Australia, dan sisanja kepada tentara Inggris.

Maka oleh karena itu pasukan² Australia baru aehir September 1945 dapat menjelesaikan pendaratan di Nusatenggara, Indonesia Timur dan Kalimantan, sedang *pasukan Inggris baru tanggal 29 September dapat mulai pendaratannya di Djakarta*, dibawah pimpinan Letnan Djendral Sir Philip Christison.

Karena diantara 17 Agustus dan 29 September 1945 banjak sendjata Djepang telah djatuh ditangan pasukan² dan lasjkar² Indonesia, maka, atas instruksi dari Mountbatten — Letnan Djendral Christison setelah mendarat di Djakarta mengumumkan, bahwa tugas pasukan Inggris hanja terbatas kepada melutjuti tentara Djepang dan membebaskan tahanan sipil dan militer, sedang Pembesar² Indonesia dinjatakan bertanggung-djawab atas keamanan didaerah-daerah jang dikuasainja.

Menurut persetujuan „Civil Affairs Agreement” antara pemerintah Inggris dan Belanda tanggal 24 Agustus 1945, yang boleh mendarat hanya tentara Inggris, tetapi kepada tentara itu *dapat diperbantukan pegawai sipil Belanda* sebagai pegawai „*Netherlands Indies Civil Affairs*” (*Nica*). Dengan kedok *Nica* inilah Belanda berhasil memasukkan orang-orangnja, tidak hanya pegawai sipil, tetapi djuga banjak militer.

Ketjuali melalui *Nica* itu, Belanda djuga dapat *menjelundupkan* orang-orangnja, baik sipil maupun militer *dalam rombongan tenaga Inggris yang ditugaskan mengurus para tahanan perang dan para interniran. (Rapwiteams = 'Rescue of Allied Prisoners of War and Internees).*

Mulai bulan Maret 1946 Panglima tentara Inggris mengizinkan Belanda berangsur-angsur mendatangkan pasukan² Belanda untuk menggantikan pasukan² Inggris yang sebagian terdiri dari pasukan² India (Gurka), sehingga pada pertengahan bulan Djuli 1945 pasukan² Australia dapat meninggalkan Kalimantan, Indonesia Timur dan Nusatenggara, dan baru achir Nopember 1946 pasukan² Inggris dapat meninggalkan Djawa dan Sumatra.

Dua kali Belanda telah mempergunakan tentaranja untuk menghantjurkan Republik Indonesia dengan serangan² yang mendadak, yang mereka namakan aksi² *polisionil*, jalah pada tanggal 20 Djuli 1947 dan pada tanggal 18 Desember 1948.

Disamping serangan² militer itu, Belanda mendjalankan politik memetjah-belah dengan mendirikan Negara² boneka. Begitu Belanda berkuasa karena pada tanggal 15 Djuli 1946 Komandan Tentara Australia menjerahkan kekuasaannja atas Indonesia Timur, Nusatenggara (ketjuali Bali Lombok), Kalimantan, Bangka dan Belitung kepada Belanda, esok harinja tanggal 16 Djuli 1946 Letnan Gubernur Djendral van Mook membuka *Konperensi* para wakil² dari daerah² tersebut tadi di *Malino*, sebuah kota pegunungan tidak djauh dari Makasar. Pertundjukan *Sandiwara anték² Belanda* itu mengambil keputusan² :

- I. Negara Indonesia nanti harus berbentuk Federal,
- II. Sebelum Negara Federal itu terbentuk, harus dilalui masa-peralihan, selama masa mana kedaulatan tetap berada ditangan Belanda,
- III. Biarpan Negara Federal itu merdeka, namun harus ada hubungan tetap dengan Nederland.

Kemudian, pada tanggal 1 Oktober 1946 van Mook mengadakan *Konperensi Minoritas (golongan² ketjil) di Pangkalpinang* antara wakil² dari golongan peranakan Tionghoa, golongan peranakan Arab dan golongan Belanda (termasuk golongan Indo Belanda). Konperensi Pangkalpinang itu menjatakan setudju dengan keputusan² Konperensi Malino. Pada Konperensi Pangkalpinang itulah untuk pertama kali disinggung daerah Irian Barat. Ir Wermuth, wakil dari perkumpulan Indo Belanda, Indo Europees Verbond (I.E.V.) mengadjukan saran supaya daerah Irian Barat „direserveer” untuk orang² Indo Belanda, dalam arti daerah itu tidak diikutsertakan dalam wilayah Negara Federal Indonesia, tetapi diadakan ikatan hubungan langsung dengan Nederland. Tentang saran Ir Wermuth tadi Konperensi tidak mengambil keputusan.

Pada tanggal 7 Desember 1946 di Denpasar (Bali) van Mook membuka *Konperensi wakil² dari daerah² wilayah Indonesia Timur dan Nusatenggara* berdjumlah 55 utusan, ditambah dengan 15 wakil dari golongan minoritas. Berdasar atas keputusan² dari Konperensi itu dengan dekrit Letnan Gubernur Djendral van Mook tanggal 24 Desember 1946 *dibentuklah Negara Indonesia Timur*, dengan semua peserta Konperensi dinjatakan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat Sementara, badan mana memilih Soekawati dari Bali sebagai „Presiden”. Dalam Undang² Dasar N.I.T. ditetapkan bahwa Presiden membentuk Kabinet Parleментар yang bertanggung djawab terhadap D.P.R. Presiden Soekawati mengangkat sebagai Perdana Menteri pertama Nadjamudin daeng Malewa, yang kemudian dipetjat karena korupsi.

Demikianlah dengan berangsur-angsur Letnan Gubernur Djendral van Mook dengan dekrit membentuk *negara² boneka* untuk „mengepung” Republik Indonesia, 25 Desember 1947 *dibentuk „Negara Sumatra Timur”* dengan sistim Kabinet Presidensiil, dan Dr Mansoer sebagai Wali Negara.

Tanggal 20 Pebruari 1948 *dibentuk „Negara Madura”* dengan sistim Kabinet Presidensiil, dan Tjakraningrat sebagai Kepala Negara.

Tanggal 24 April 1948 *dibentuk „Negara Pasundan”* dengan sistim Kabinet Parleментар, dan Wiranatakusuma sebagai Wali Negara.

Tanggal 30 Agustus 1948 dibentuk „Negara Sumatera Selatan” dengan sistim Kabinet Presidensiil, dan Abdul Malik sebagai Kepala Negara.

Tanggal 26 Nopember 1948 dibentuk „Negara Djawa Timur” dengan sistim Kabinet Presidensiil, dan Kusumonegoro sebagai Kepala Negara.

Disamping negara² boneka, berturut-turut dibentuk Daerah² Otonom 1. Kalimantan Barat, 2. Kalimantan Timur, 3. Dajak Besar, 4. Bandjar, 5. Kalimantan Tenggara 6. Bangka, 7. Belitung, 8. Riau dan 9. Djawa Tengah.

Dengan sistim Kabinet jang berbeda-beda dan sebutan Kepala Negara jang berbeda-beda pula menurut kehendak dari wakil² rakjat jang bersangkutan itu nampaknja Belanda hendak mem-buktikan pelaksanaan dari „selfdetermination” (hak menentukan nasib sendiri), namun bagaimanakah kenjataan jang sebenarnya ?

Kenjataannya ialah bahwa jang ditondjolkkan Belanda sebagai wakil² rakjat itu semuanya orang² jang berhaluan „Co”, jang berchianat terhadap Republik Indonesia dan memihak kepada musuh.

Pertentangan antara „Non” dan „Co”.

Baiklah kiranja kita tindjau lebih meudalam pertentangan antara „Non” dan „Co” itu.

Apabila dalam zaman kolonial, djadi *sebelum Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945*, pertentangan antara „Non” dan „Co” tidak mengenai *prinsip*, melainkan hanja mengenai *taktik* belaka, karena kedua belah pihak bertjita-tjita Kemerdekaan, dan hanja berbeda mengenai tjara memperdjoangkannya, ialah golongan „Co” suka dan golongan „Non” menolak bekerdja sebagai pegawai negeri dan/atau duduk sebagai anggota dari Badan² Perwakilan, namun *sesudah Kemerdekaan tertjapai*, maka pertentangan antara „Non” dan „Co” tidak lagi hanja mengenai „taktik” sadja, melainkan mengenai „prinsip”, karena golongan „Non” membela dan mempertahankan Kemerdekaan, sedang golongan „Co” suka bekerdja sama dengan musuh jang menghendaki hantjurnja Kemerdekaan itu, djadi pertentangan antara „Non” dan „Co” itu berarti pertentangan antara „Republik” dan „Federalis”, atau antara „Patriot” dan „Penjebrang”.

Diantara orang² Federalis/Penjebrang itu ada jang *dari semula sudah berdjiwa lemah*, tidak pertjaja pada kemampuan bangsanja sendiri, menganggap bangsanja sendiri belum „matang” untuk merdeka. Disamping mereka ada orang² „Co” jang semula berhaluan Patriot dan menduduki djabatan² penting dalam pemerintahan Republik Indonesia, kemudian berbalik muka menjebrang pada fihak musuh, karena *tidak tahan menderita atau karena hanja mengingat pada kepentingan sendiri sadja*.

Orang² jang konsekwen tetap berhaluan „Non” adalah berdjiwa kuat. Mereka lebih suka menderita sebagai pengungsi atau pedjoang gerilja, atau biarpun tidak keluar dari kota, toh tetap menolak bekerdja pada Belanda, dari pada hidup mewah sebagai budak sipendjadjah.

Maka dari itu adalah tepat sekali penetapan dari „Panitya Re-tooling Aparatur Negara”, bahwa untuk memangku djabatan² penting harus dipenuhi sjarat „*tidak pernah absen dalam perdjoangan revolusi nasional kita*”. 1)

Segala usaha Belanda untuk menghantjurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dengan kekerasan militer maupun dengan siasat politis, ahirnja gagal semuanya : Republik Indonesia Serikat sebagai hatsil Konperensi Medja Bundar, jang menurunkan deradjat Republik Indonesia kepada tingkat Negara bagian, ternjata hanja dapat bertahan 8 bulan sadja, karena pada tanggal 17 Agustus 1950 Republik Indonesia bangkit kembali sebagai Negara Kesatuan jang merdeka dan berdaulat penuh kedalam dan keluar.

Noot 1) = Sebagai tjontoh „tidak pernah absen” dengan „tahan menderita” ialah antara lain : I. Wakil Menteri-Pertama dibidang Dalam Negeri — Menteri Kehakiman Sahardjo SH, jang sesudah Clash ke-II tidak segan² berkeliling naik sepeda dikota Sala mendjual ketjap.

II. Isteri saja sendiri, karena saja bergerilja selama 7 bulan, mempertahankan diri dengan membikin dan mendjual telur asin.

B A B III

PERDJOANGAN DIPLOMASI UNTUK MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

Kabinet pertama dari Republik Indonesia adalah bersifat Presidensil, dipimpin oleh Presiden Soekarno sendiri sebagai Perdana Menteri dan Wakil Presiden Mohamad Hatta sebagai Wakil Perdana Menteri.

Pada tanggal 14 Nopember 1945 Presiden membubarkan Kabinet pertama itu dan membentuk Kabinet baru yang bersifat Parlementer, dengan Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri.

Perundingan pertama antara van Mook dan Sjahrir dengan pimpinan Djendral Christison terdjadi pada tanggal 17 Nopember 1945, tetapi tidak mengahatsilkan sesuatu apapun.

Pada tanggal 2 Pebruari 1946 tiba di Djakarta seorang diplomat ulung Sir Archibald Clark Kerr, yang sebagai Duta Besar Inggris dipindahkan dari Moskow ke Washington, tetapi sebelum mulai memangku djabatan barunja itu, oleh Pemerintah Inggris ditugaskan untuk membantu Pemerintah Belanda dan Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan sengketa mereka.

Dalam pada itu Pemerintah Belanda mengumumkan sebuah Pernyataan tertanggal 10 Pebruari 1946, yang berintisari seperti berikut :

„Dengan berdasar atas pidato radio Ratu Wilhelmina tanggal 6 Desember 1942, didjandjikan pada rakjat Indonesia, setelah melalui masa persiapan tertentu, dengan bebas dapat menetapkan nasibnja sendiri sesuai dengan pasal 73 Piagam Perserikatan Bangsa².

Untuk kebahagiaan rakjat Indonesia sendiri, sebaiknya dengan sukarela dilandjutkan perhubungan erat dalam lingkungan „Keradjaan Belanda bentuk baru², yang pesertanja terdiri dari Netherland, Indonesia, Suriname dan Curaçao².

Atas Pernyataan Pemerintah Belanda itu *Pemerintah Republik Indonesia* pada tanggal 13 Maret 1946 memberikan *balasan* yang intisarinja ialah :

- a. Menuntut pengakuan *kedaulatan* Republik Indonesia diatas *seluruh wilayah bekas Hindia Belanda*;
- b. Mendjamin *hak* dari golongan minoritas, dan politik *pintu terbuka* untuk kapital asing;
- c. Sanggup *mengoper semua hutang* dari Hindia Belanda jang terjadi sebelum Maret 1942;
- d. Sedia mendjadi peserta dalam *Federasi Nederland — Indonesia*, dengan hubungan luar negeri dan pertahanan diurus bersama.

Kemudian, dengan bertjermin pada persetujuan Vietnam — Perantjis tertanggal 6 Maret 1946, jang mengakui Vietnam sebagai negara merdeka tetapi tetap bergabung kepada Persekutuan Perantjis „Union Française”, van Mook menjampaikan *usul* kepada Sjahrir jang berisi : pengakuan *Republik Djawa* sebagai negara bagian dari *Republik Federal Indonesia Serikat*, jang mendjadi *peserta* dalam *Keradjaan Belanda bentuk baru*.

Atas usul van Mook itu pada tanggal 27 Maret 1946 Sjahrir memberikan *djawaban* jang disertai naskah persetujuan berbentuk „tractaat”, jang berintisari :

- a. Supaja *Belanda* mengakui *R.I. de facto berdaulat atas Djawa dan Sumatra*;
- b. Supaja Belanda dan R.I. bekerdja sama membentuk *Republik Indonesia Serikat*;
- c. *Republik Indonesia Serikat* bersama dengan Nederland, Suriname dan Curaçao mendjadi *peserta dalam suatu ikatan kenegaraan*.

Oleh karena ternjata bahwa pendirian keduabelah pihak telah saling mendekati maka Pemerintah R.I. awal bulan *April 1946* mengutus *Delegasi* ke Negeri Belanda terdiri dari Suwandi SH, Dr Soedarsono dan Abdulkarim Pringgodigdo SH. Delegasi mana dengan bantuan Sir Archibald Clark Kerr mengadakan *perundingan* di „Hoge Veluwe”, jang ternjata gagal karena Pemerintah Belanda hanya dapat menerima persetujuan jang berbentuk „Protokol”, dan hanya bersedia mengakui R.I. berdaulat atas Djawa dan Madura.

Sebagai pengganti dari Sir Archibald Clark Kerr, telah tiba di Indonesia dalam bulan Mei 1946 Duta Besar Lord Killearn, coordinator politik untuk djadjahan Inggris di Timur Djauh, dengan tugas istimewa berusaha menjapai persetudjuan antara Belanda dan Indonesia.

Pada awal Djuli 1946 di Nederland dibentuk Kabinet baru dengan Dr Beel sebagai Perdana Menteri dan Mr Jonkman, bekas Ketua Volksraad, sebagai Menteri untuk daerah sebrang lautan.

Untuk membantu Letnan Gubernur Djendral van Mook dalam perundingan dengan Pemerintah R.I., Kabinet Beel mengangkat „Commissie Generaal”, terdiri dari Prof. Schermerhorn sebagai Ketua, dan van Poll, De Boer dan van Mook sebagai anggota.

Pada tanggal 2 Oktober 1946 dibentuk Kabinet R.I. baru dengan susunan koalisi seperti berikut :

1. Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri :
Sutan Sjahrir (Partai Sosialis)
2. Menteri Muda Luar Negeri :
Hadji Agus Salim (Masjumi)
3. Menteri Dalam Negeri :
Mohamad Roem SH (Masjumi)
4. Menteri Muda Dalam Negeri :
Wijono (Barisan Tani Indonesia)
5. Menteri Kehakiman :
Drs Susanto Tirtoprodjo SH (P.N.I.)
6. Menteri Muda Kehakiman :
Hadi SH (tidak berpartai)
7. Menteri Keuangan
Sjafrudin Prawiranegara SH (Masjumi)
8. Menteri Muda Keuangan :
Lukman Hakim SH (P.N.I.)
9. Menteri Kesehatan :
Dr Darmasetiawan (tidak berpartai)
10. Menteri Muda Kesehatan :
Dr Leimena (Parkindo)
11. Menteri Kemakmuran :
Dr A.K. Gani (P.N.I.)

12. Menteri Muda Kemakmuran :
Jusuf Wibisono SH (Masjumi)
13. Menteri Pengadjaran Pendidikan dan Kebudayaan :
Suwandi SH (tidak berpartai)
14. Menteri Muda P. P. dan K :
Ir Gunarso (tidak berpartai)
15. Menteri Sosial :
Nj. Maria Ulfah SH (tidak berpartai)
16. Menteri Muda Sosial :
Abdulmadjid SH (Partai Sosialis)
17. Menteri Agama :
Hadji Faturrachman (Masjumi)
18. Menteri Pertahanan :
Amir Sjarifudin SH (Partai Sosialis)
19. Menteri Muda Pertahanan :
Harsono Tjokroaminoto (Masjumi)
20. Menteri Penerangan :
Mohammad Natsir (Masjumi)
21. Menteri Muda Penerangan :
A.R. Baswedan (tidak berpartai)
22. Menteri Perhubungan :
Ir Djuanda (tidak berpartai)
23. Menteri Muda Perhubungan :
Setiadjid (Partai Buruh Indonesia)
24. Menteri Pekerdjaan Umum :
Ir Putuhena (Parkindo)
25. Menteri Muda Pekerdjaan Umum :
Ir Laoh (P.N.I.)

Menteri² Negara :

26. Sultan Hamengku Buwono (tidak berpartai)
27. Wachid Hasjim (Masjumi)
28. Wikaua (wakil Pemuda)
29. Dr Soedarsono (Partai Sosialis)
30. Tan Po Gwan SH (Partai Sosialis)

Untuk menghadapi Commissie Djendral Belanda dalam perundingan, Presiden atas usul Kabinet membentuk *Delegasi Republik Indonesia, terdiri dari Sutan Sjahrir sebagai Ketua, dan Rum SH Drs Susanto Tirtoprodjo SH dan Dr Gani sebagai anggota.*

Pada tanggal 7 Oktober 1946 dirumah Konsul Djendral Inggris diadakan rapat pertama kedua Delegasi dibawah pimpinan Lord Killearn. Rapat² selanjutnja diadakan berganti-ganti di Palais Rijswijk (sekarang Istana Negara) dan di Pegangsaan Timur 56.

Pada awal Nopember 1946 keduabelah pihak memutuskan untuk melanjutkan perundingan didaerah jang dikuasai R.I., agar dapat dihadliri oleh Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Hatta, ialah dikota ketjil dipegunungan tidak djauh dari Tjirebon, *Linggardjati.*

Dengan tjampurtangan aktif dari Bung Karno, pada tanggal 12 Nopember telah tertjapai persetujuan, jang akan diparaf di Djakarta.

✓ Pada tanggal 15 Nopember 1946, dalam upatjara resmi di Istana Negara kedua *Delegasi memparaf Naskah Persetujuan Linggardjati.*

Adapun intisiri dari Persetujuan itu adalah seperti berikut :

- a. Pemerintah Belanda mengakui Pemerintah Republik Indonesia *berkuasa defacto* atas *Djawa, Madura dan Sumatra.*
Pasukan² Belanda jang menduduki bagian² dari daerah *defacto* itu harus dikeluarkan paling lambat tanggal 1 Djanuari 1949.
- b. Kedua Pemerintah akan bekerdja sama untuk dalam waktu singkat membentuk suatu *Negara federal jang berdaulat dan demokratis, bernama „Republik Indonesia Serikat“.*
Wilajah R.I.S. akan meliputi seluruh wilajah Hindia Belanda dengan pengertian bahwa, apabila rakjat dari sesuatu daerah tidak suka ikut dalam R.I.S., akan diadakan hubungan istimewa antara daerah itu dengan R.I.S. dan Keradjaan Belanda.
R.I.S. akan terdiri dari negara² Republik Indonesia, Kalimantan dan Timur Besar, dengan tidak mengurangi hak rakjat dari sesuatu daerah supaja hubungannja dengan R.I.S. diatur setjara lain.

- c. Untuk memperhatikan kepentingan² bersama, kedua belah Pemerintah akan membentuk „*Unie Belanda — Indonesia*” dengan sebagai peserta R.I.S. dan Keradjaan Belanda (jang meliputi Nederland, Suriname dan Curaçao).

Sebagai kepentingan² bersama dinjatakan hubungan luar negeri, pertahanan dan — sependjang dipandang perlu — keuangan serta masalah² lain dalam bidang ekonomi dan kebudayaan.

Kepala Unie adalah Radja Belanda

Keputusan² mengenai kepentingan² bersama ditetapkan atas nama Radja.

- d. Kedua Pemerintah akan berusaha agar *pembentukan R.I.S. dan Unie terlaksana sebelum tanggal 1 Djanuari 1949.*

Sedang menunggu pembentukan R.I.S. dan Unie itu, Pemerintah Belanda akan mengambil tindakan² perundang-undangan untuk merobah bentuk Pemerintah Hindia Belanda dan untuk menjesuaikan kedudukan nasional dan internasional Keradjaan Belanda dengan adanya R.I.S. dan Unie.

- e. Untuk melaksanakan kerdjasama Belanda Indonesia itu akan dibentuk sebuah Badan terdiri dari Delegasi kedua Pemerintah dengan Sekretariat bersama.

Semua perselisihan tentang pelaksanaan persetudjuan ini jang tidak dapat dipetjahkan oleh Badan tersebut akan diselesaikan dengan djalan arbitrage. Untuk itu Badan itu harus dipimpin oleh seorang Ketua, jang disetudjui kedua Delegasi, atau — apabila persetudjuan itu tidak tertjapai — jang diangkat oleh Ketua Mahkamah Pengadilan Internasional.

Naskah Persetudjuan Linggardjati ditentang hebat, baik dalam Parlemen Belanda maupun dalam Komite Nasional Indonesia Pusat.

Opposisi dalam Parlemen Belanda terutama menentang kemungkinan Unie mendjadi „Superstaat”, sehingga Nederland tidak lagi berdaulat penuh. Opposisi itu dapat diatasi setelah Menteri-sebrang lautan Mr Jonkman menegaskan, bahwa Unie bukanlah merupakan superstaat karena jang dimaksudkan bukanlah Unie riil atau Unie berat, melainkan Unie personil atau Unie enteng.

Setelah diberikan penegasan itu, maka *Parlemen Belanda menjetudjui Naskah Linggardjati pada tanggal 20 Desember 1946.*

Opposisi dalam Komité Nasional Indonesia Pusat terutama menentang penetapan Radja Belanda sebagai Kepala Unie. Baru setelah Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta mengantjani akan meletakkan djabatannja apabila Naskah Linggardjati ditolak, maka *K.N.I.P. menjetudjuinja pada tanggal 25 Pebruari 1947.*

Kemudian, pada tanggal 25 Maret 1947 *kedua Delegasi menandatangani Persetujuan Linggardjati* dalam upatjara resmi di Istana Negara di Djakarta.

Sebagai akibat dari penandatanganan itu, maka *Inggris* pada tanggal 31 Maret 1947 dan *Amerika Serikat* pada tgl. 23 April 1947 *mengakui R.I. berkuasa defacto atas Djawa, Madura dan Sumatra.*

PELAKSANAAN PERSETUDJUAN LINGGARDJATI

Dalam melaksanakan Persetujuan Linggardjati ternjata timbul banjak kesukaran. Kesukaran² itu bersumber pada perbedaan interpretasi :

Pemerintah Belanda berpendapat, bahwa sebelum R.I.S. dibentuk, hanja Belandalah jang berdaulat atas seluruh wilajah bekas Hindia Belanda, sehingga Republik Indonesia harus menghentikan hubungannja dengan luar negeri, dan Pemerintah Belanda minta diadakan „Polisi Bersama” untuk mendjaga keamanan dalam negeri.

Sedangkan Pemerintah R.I. berpendapat bahwa sebelum R.I.S. terbentuk, kedudukan defacto R.I. tidak berubah, sehingga R.I. tetap berhak melandjutkan hubungannja dengan luar negeri, dan Pemerintah R.I. menolak diadakannja „Polisi Bersama”, karena hanja Pemerintah R.I. sendirilah jang bertanggung-djawab penuh atas keamanan didaerahnja.

Karena perbedaan interpretasi ini tidak dapat diselesaikan, maka Belanda hendak memaksakan interpretasinja dengan melantjarkan *Aksi Militer jang Pertama pada tanggal 20 Djuli 1947* djam 12 tengah malam.

Pada tanggal 31 Djuli 1947 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa² menerima resolusi jang diusulkan oleh India dan Australia, resolusi mana memerintahkan supaya segera diadakan gentjatan sendjata dan supaya perundingan dilandjutkan.

Baru pada tanggal 4 Agustus 1947 Pemerintah Belanda menjalankan perintah gentjatan sendjata, setelah berhasil menduduki Djawa Barat, daerah sekitar Semarang, sebagian daerah Djawa Timur, Madura, dan daerah² sekitar Medan, Palembang dan Padang.

Pada tanggal 25 Agustus 1947 Dewan Keamanan P.B.B. menawarkan djasu² baik dari sebuah Komisi, terdiri seorang anggota ditundjuk oleh Pemerintah Belanda, seorang anggota lainnja ditundjuk oleh Pemerintah R.I., dan anggota ketiga ditundjuk bersama oleh dua anggota tadi.

Untuk melaksanakan tawaran dari Dewan Keamanan tadi Pemerintah Belanda menundjuk Van Zeeland dari Belgia, Pemerintah R.I. menundjuk Kirby dari Australia, dan dua anggota itu bersama menundjuk Graham dari Amerika sebagai anggota ketiga.

Untuk melanjutkan perundingan, Pemerintah Belanda membentuk Delegasi terdiri dari Abdulkadir Widjoatmodjo, van Vredenburg beserta wakil² dari Timur Besar, Sumatra Timur, Kalimantan dan Bangka, sedang Delegasi R.I. terdiri dari Amir Sjarifudin SH, Ali Sastroamidjojo SH, Hadji Agus Salim, Dr Leimena, Mohamad Roem SH, Dr Tjoa Sik Ien dan Nasrun SH.

✓ Perundingan antara kedua Delegasi dimulai pada tanggal 2 Desember 1947 diatas kapal Amerika Serikat „Renville” dipelabuhan Tandjung Priok.

Pada tanggal 17 Djanuari 1948 ditandatangani „Persetudjuan Renville”, jang intisarinja ialah :

- a. Belanda tetap berdaulat atas seluruh Indonesia, sampai kedaulatan diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat, jang segera harus dibentuk;
- b. Sebelum R.I.S. dibentuk Belanda dapat serahkan sebagian dari kekuasaannja kepada suatu Pemerintah Federal Sementara;
- c. R.I.S. sebagai Negara jang merdeka dan berdaulat akan menjadi peserta sedjadjar dengan Keradjaan Belanda dalam Unie Nederland Indonesia, dengan Radja Belanda sebagai Kepalanja;
- d. Republik Indonesia akan merupakan Negara Bagian dari R.I.S.;
- e. Dalam djangka waktu sedikitnja 6 bulan dan selambat-lambatnja 1 tahun supaya diadakan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante R.I.S.

Dalam pada itu Pemerintah R.I. tetap berpegang teguh pada pernyataan dari anggota Komisi Djasas² Baik Graham, bahwa R.I. selama R.I.S. belum dibentuk tetap berhak atas Tentara, Hubungan luar negeri dan Keuangan sendiri. Terkenallah kata² Graham kepada Delegasi kita : „You are what you are”.

Pemerintah R.I. tidak mungkin melepaskan perhubungan luar negeri jang — atas usaha Hadji Agus Salim jang mengadakan per-djalanan keliling — berupa pengakuan *de jure berturut-turut oleh Mesir pada 1 Djuni 1947, Libanon tanggal 29 Djuni 1947, Syria tanggal 2 Djuli 1947, Irak tanggal 16 Djuli 1947, Afghanistan tanggal 23 September 1947, dan Saudi Arabia tanggal 24 Nopember 1947.*

Tidak lama setelah tertjapai Persetujuan Renville, terdjadilah penggantian anggota² Komisi Djasas² Baik, ialah Herremans untuk Belgia, Critchly untuk Australia dan Dubois untuk Amerika Serikat.

Dalam melaksanakan Persetujuan Renville timbul kesukaran² jang pada pokoknja bersumber pada :

- a. Mengenai *Pemerintah Federal Sementara*, Belanda berpendapat bahwa Pemerintah itu harus dipimpin oleh Wakil Tinggi Mahkota Belanda, sedang kita berpendirian Pemerintah Federal Sementara harus bersifat nasional, djadi harus terdiri seluruhnja dari orang² Indonesia.
- b. Mengenai *hubungan luar negeri R.I. dengan negara² lain*. Belanda menuntut penghapusannja, sedang kita tetap mempertahankannja.

Sementara itu Letnan Gubernur Djendral van Mook pada tanggal 3 Nopember 1948 diganti Dr Beel dengan sebutan „Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon”.

Achirnja, Belanda untuk kedua kalinya hendak memaksakan pendiriannja dengan setjara pengetjut dan mendadak *menjerang ibukota R.I. Djogjakarta pada tanggal 18 Desember 1948, serangan mana terkenal sebagai „Clash kedua”.*

Pasukan² pajung Belanda mendarat dilapangan terbang Maguwo, terus menjerbu kota Djokja dan berhasil menangkap Bung Karno, Bung Hatta dan beberapa pemimpin² R.I. lainnja, jang selandjutnja ditahan di Prapat, kemudian dipindahkan ke Bangka.

Dewan Keamanan P.B.B. baru pada tanggal 28 Djanuari 1949 menerima resolusi jang memuat perintah :

- I. Supaja segera dilakukan „cease fire” (pemberhentian tembak menembak).
- II. Supaja pemimpin² R.I. segera dibebaskan dan dikembalikan ke Djokja.

Belanda bersedia menghentikan tembak menembak, tetapi menolak untuk membebaskan pemimpin² R.I.

Dalam pada itu Komisi Djasa² Baik diganti nama mendjadi „United Nations Commission for Indonesia” (Unci = Komisi P.B.B. untuk masalah Indonesia), dan anggota dari Amerika Serikat Dubois diganti Cochran.

Dengan dipimpin oleh Cochran, pada tanggal 14 April 1949 dimulai perundingan antara Dr van Royen dan Roem SH.

Pada tanggal 7 Mei tertjapailah „Persetudjuan Roem — van Royen”, jang antara lain memuat kesediaan Belanda untuk membebaskan pemimpin² R.I. untuk kembali ke Djokja, keputusan mana dilaksanakan pada tanggal 6 Djuli 1949.

Dalam pada itu, sebelum ditangkap Belanda pada tanggal 19 Desember 1948 Presiden Soekarno telah memberikan kuasa kepada Menteri Sjafrudin Prawiranegara, jang pada saat itu diketahui dengan pasti sedang bertournee di Sumatra, untuk membentuk „Pemerintah Darurat R.I.”, agar supaja Pemerintah Pusat R.I. berlangsung terus.

Sjafrudin SH kembali masuk Djokja tanggal 10 Djuli 1949, kemudian berturut-turut Panglima Besar Soedirman dan saja (Drs Susanto Tirtoprodjo SH), sehingga pada tanggal 13 Djuli 1949 Kabinet pleno dapat bersidang lagi, dalam sidang mana Sjafrudin SH menjerahkan kembali maudatnja kepada Presiden Soekarno.

Konperensi Medja Bundar

Sesuai dengan Linggardjati dan Renville jang menghendaki supaja Pemerintah Belanda dan Pemerintah R.I. bersama-sama berusaha membentuk Republik Indonesia Serikat, maka pada tgl. 23 Agustus 1949 di Den Haag dimulai perundingan „Konperensi Medja Bundar”, disingkat K.M.B., dimana Delegasi R.I. dipimpin Bung Hatta.

K.M.B. berachir pada tanggal 29 Oktober 1949 dengan menghasilkan „Piagam penjerahan kedaulatan” dari Keradjaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat jang harus dilaksanakan sebe-

lum tanggal 1 Djanuari 1950. Dapat pula disetudjui Rantjangan Undang² Dasar R.I.S., jang masih harus disjahkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat dan oleh Dewan² Perwakilan Rakjat dari negara² dan daerah²-otonom jang akan mendjadi peserta dari R.I.S.

Pada tanggal 15 Desember 1949 Komite Nasional Indonesia Pusat dengan 226 suara lawan 62 menjetudjui hasil² K.M.B., dan pada tanggal 17 Desember 1949 Bung Karno dinobatkan sebagai Presiden R.I.S.

Presiden Soekarno menundjuk Bung Hatta sebagai Formateur Kabinet R.I.S. pertama, jang pada tanggal 19 Desember 1949 dibentuk dengan susunan seperti berikut :

1. Perdana Menteri, merangkap Menteri Luar Negeri : Mohamad Hatta
2. Menteri Pertahanan : Sultan Hamengku Buwono IX
3. Menteri Dalam Negeri : Anak Agung Gede Agung
4. Menteri Keuangan : Sjafrudin Prawiranegara SH
5. Menteri Kemakmuran : Ir Djuanda
6. Menteri Perhubungan, Pekerdjaan Umum dan Tenaga : Ir Laoh
7. Menteri Kehakiman : Prof. Dr Supomo SH
8. Menteri P.P. dan K. : Dr Abu Hanifah
9. Menteri Kesehatan : Dr Leimena
10. Menteri Perburuhan : Wilopo SH
11. Menteri Sosial : Kosasih Purwanegara SH
12. Menteri Agama : H.A. Wachid Hasjim
13. Menteri Penerangan : A. Mononutu
14. }
15. } Menteri² Negara : Sultan Hamid
16. } Mohamad Roem SH
Dr Suparmo

Pada tanggal 27 Desember 1949 terdjadi serentak :

- I. Di Amsterdam penjerahan kedaulatan dari Keradjaan Belanda kepada R.I.S.
- II. Di Djokja penjerahan kedaulatan dari R.I. kepada R.I.S.
- III. Di Djakarta penjerahan kekuasaan dari wakil Belanda Lovink kepada wakil Indonesia Sri Sultan Hamengku Buwono.

B A B IV

PERDJOANGAN BERSENDJATA

Setelah Djepang menjerah, maka Pemerintah Pendudukan Tentara Djepang di Indonesia membubarkan pasukan² „Peta” dan memberhentikan tenaga² „Heiho”.

Menurut pendapat Djendral A.H. Nasution dalam bukunya jang berdjulul „T.N.I.” (Tentara Nasional Indonesia) apabila segera setelah Proklamasi Kemerdekaan bekas² Peta dan Heiho dihentikan sebagai Tentara jang teratur, maka djumlah tenaga² itu tjukup untuk mendirikan 60 bataljon, jang dengan bantuan rakjat dan pemuda² revolusioner pasti dapat merehut semua persendjataan dari pasukan² Djepang, sehingga pasukan² Sekutu jang mendarat akan menghadapi Tentara Republik Indonesia jang kuat, dan Belanda tidak berkesempatan memasukkan pasukan-pasukannya.

Akan tetapi Pemerintah R.I. setelah Proklamasi berpendirian bahwa usaha mempertegak Kemerdekaan jang telah diproklamasikan itu primair harus melalui djalan diplomasi, sedang perdjoangan bersendjata ditempatkan pada taraf kedua.

Adapun unsur penting dari djalan diplomasi itu ialah membuktikau pada dunia luar pada Sekutu jang menang perang dan akan mengoper kekuasaan dari Djepang, bahwa Pemerintah R.I. sanggup dan mampu memelihara ketertiban dan keamanan.

Maka dari itu sehari sesudah Proklamasi, ialah pada tanggal 18 Agustus 1945 Dwitunggal Soekarno — Hatta dalam sebuah Maklumat Pemerintah berseru :

„Sekalian Rakjat Indonesia dari segala lapisan tinggal *tenteram, tenang, siap-sedia dan memegang teguh disiplin*”.

Seruan itu dipertegas lagi dalam pidato radio Bung Hatta tanggal 29 Agustus 1945, jang antara lain memuat kata² seperti berikut :

„Dalam perdjoangan kita seterusnya untuk mentjapai penetapan kemerdekaan kita, kita akan berhadapan dengan Negara-negara Sekutu jang berkuasa dan sekarang mengatur perdamaian dunia. Terhadap mereka atau utusannya kita harus membuktikan bahwa kita sebagai Bangsa sanggup mendjaga ketenteraman umum. Kesanggupan itu adalah salah satu sjarat untuk menjatakan adanya suatu „stable government”, ialah Pemerintah jang teratur dan sanggup mengatur.

Djanganlah hendaknja ada tindakan dari rakjat kita jang bisa merugikan bangsa Indonesia dalam pandangan Negara lain”.

Usaha pertama dari Pemerintah R.I. dalam bidang pertahanan hanya membentuk „*Badan Keamanan Rakjat*” pada tanggal 22 Agustus 1945, jang dalam pidato radio Bung Karno pada tanggal 23 Agustus antara lain didjelaskan seperti berikut :

„Kita adakan Badan Keamanan Rakjat ini untuk mendapat keamanan jang seteguh-teguhja. Banjak sekali tenaga² jang tepat sekali untuk melaksanakan pekerdjaan ini. Bekas pradjurit Peta, bekas pradjurit Heiho, bekas pradjurit Pelaut, pemuda-pemuda jang penuh dengan semangat pembangunan, mereka semua adalah tenaga-tenaga jang baik untuk pekerdjaan ini.

Karena itu saja mengharap kepada kamu sekalian, hai pradjurit-pradjurit bekas Peta, Heiho dan Pelaut, beserta pemuda-pemuda lain *untuk sementara waktu masuklah dan bekerdjalah dalam Badan Keamanan Rakjat.*

Pertjajalah, *nanti akan datang saatnja*, kamu dipanggil untuk mendjadi pradjurit dalam *Tentara Kebangsaan Indonesia*”.

Karena semangat rakjat, terutama semangat pemuda, meluap-luap maka segera setelah Proklamasi Kemerdekaan terbentuklah dimana-mana Lasjkar² Rakjat, misalnja *Barisan Banteng, Barisan Pelopor, Barisan „Kris”, Barisan Hisbullah* dls. Djuga di Sumatra segera terbentuk Lasjkar² Rakjat dengan nama² jang menamatkan, misalnja „*Harimau Liar*”, „*Naga Terbang*” dls.

Lasjkar² Rakjat itulah jang segera bertindak untuk mendapatkan sendjata dari pasukan² Djepang, ada kalanja dengan djalan kekerasan, biarpun hanya dengan memegang bambu runtjing dan golok, ada kalanja pula dengan djalan „diplomasi”.

Suatu tjontoh dari tjara memperoleh sendjata Djepang dengan djalan „diplomasi” ialah apa jang saja alami sendiri di Madiun. Residen Madiun R.T. Kusnindar bersama saja sebagai Bupati Ponorogo pada awal September 1945 menemui Syutyokan Djepang untuk Keresidenan Madiun dengan tuntutan atas nama Rakjat

supaja pasukan² Djepang menjerahkan sendjatanja kepada kita. Syutyokan jang sudah putus asa itu menerangkan bahwa ia tidak dapat menjerahkan begitu sadja persendjataannya, karena bertentangan dengan instruksi jang diterimanja; akan tetapi, djika rakjat menjerang, ia akan terpaksa menjerahkan persendjataannya dengan alasan untuk menghindarkan pertumpahan darah. Maka dari itu ia sarankan „Sandiwara” serbuan rakjat. Demikianlah dengan menjelenggarakan „sandiwara” itu, pada suatu hari beribu-ribu rakjat dan pemuda dengan memegang bambu-runtjing, blati atau golok mengepung asrama² pasukan Djepang, jang achirnja tanpa mengadakan perlawanan menjerahkan semua persendjataannya.

PERISTIWA KEPAHLAWANAN DI SURABAJA

Di Surabaya tentara Inggris baru datang pada tanggal 25 Oktober 1945 dibawah pimpinan Brigadir Djendral Mallaby.

Tanggal 27 Oktober tentara Inggris mulai menduduki gedung² Pemerintah, jang dipertahankan oleh rakjat dan pemuda Indonesia, sehingga terdjadi pertempuran. Tanggal 29 Oktober atas permintaan Letnan Djendral Christison, Presiden Soekarno terbang ke Surabaya untuk menghentikan pertempuran. Usaha Bung Karno berhasil dengan tertjapainja gentjatan sendjata. Pada tanggal 31 Oktober tersiarlah berita, bahwa Brigadir Djendral Mallaby „hilang” kemudian ternjata terbunuh. Karena tidak dapat menangkap pembunuhnja, maka pada tanggal 9 Nopember, Djendral Manserg dengan surat sebaran menjampaikan ultimatum jang intisarinja adalah seperti berikut : „Jang bersalah dalam pembunuhan Brigadir Djendral Mallaby, supaja datang menghadap padanja menjerahkan diri. Djika hal itu tak diturutnja sampai djam 6 pagi tanggal 10 Nopember, segenap angkatan darat, laut, dan udara dibawah pimpinannya akan dikerahkan untuk memperkuat ultimatum tsb.”.

Sampai tanggal 10 Nopember djam 6 pagi, tidak ada seorang pun dari bangsa Indonesia jang datang menjerahkan diri, sehingga mulai saat itu djugalah mengguntur dentuman meriam² Inggris jang memuntahkan pelurunya dikota Surabaya.

Rakjat dan pemuda Surabaya masih djuga mentjoba mempertahankan kotanja, namun sendjata ringan dan bambu runtjing tidak berdaja menghadapi meriam² berat dan tank² Inggeris sehingga terpaksa pasukan² bersendjata Indonesia mengundurkan diri kedjurusan Modjokerto.

Peristiwa tsb. diatas itulah jang mendjadi alasan tanggal 10 Nopember ditetapkan sebagai *Hari Pahlawan*, jang untuk pertama kali dirajakan pada tanggal 10 Nopember 1946.

Rakjat dan pemuda Indonesia dalam pertempuran sekitar tanggal 10 Nopember 1945, menundjukkan kesediaannya berkorban djiwa raga untuk menegakkan Kemerdekaan Bangsa dan Negara dengan keberaniannya menghadapi tentara asing jang bersendjata berat dan lengkap hanja dengan sendjata ringan dan bambu runtjing.

Hanja semangat pahlawanlah jang dapat menimbulkan keberanian itu, dan oleh karena itu tanggal 10 Nopember tiap tahun diperingati sebagai Hari Pahlawan.

PERISTIWA KEPAHLAWANAN DI BALI

Pada pertengahan tahun 1946 timbullah banjak kesulitan dalam perdjoangan di Bali. Perdjoangan politik sebagian terbesar telah putus. Radja² telah tunduk kepada Belanda, jang memulai mengatur susunan² pemerintahan jang permanen. Aksi politik itu berlangsung diseluruh Indonesia Timur, dan Belanda mentjapai basil² jang memuaskan baginja. Pemuka² pergerakan Indonesia golongan tua pada umumnya sudah kembali untuk bekerdja bersama dengan Hindia Belanda. Suasana kota² dan desa² banjak pula sudah dipasifikasikan dan kehidupan berangsur-angsur mendjadi biasa. Kegiatan marine Belanda memperketjil lalu-lintas dengan pulau Djawa dan lain² daerah.

Dengan patahnya perlawanan politik, maka kaum gerilja, pemuda² pedjoang semakin terpentjil dan tertekan, sedangkan Belanda meneruskan kegiatan² untuk memburu-buru, sambil memperhebat aktivitas politik psychologisnja. Dengan bantuan radja² dapatlah mereka mengadakan barisan² pengawal, jang dilantik dengan upatjara² keagamaan menurut kebiasaan rakjat.

Bulan Djuni diumumkan oleh Pak KOMPIANG Sudjana sebagai putjuk pimpinan MBODPRI (Markas Besar Umum DPRI) Daerah Buleleng tentang penjerahan pemuda² di Munduk-Marangsing (Galungan-Buleleng). *Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai* terpaksa mengesahkan tindakan tsb. sebagai taktik perdjoangan untuk menghadapi kegentingan. Posisi gerilja sudah sulit, ruangan bergerak sudah sempit, perawatan sudah berat sekali. Sebagian dari anak buah diperkenankan pulang ketempat-tempat pendudukan, dimana mereka seharusnja meneruskan perdjoangan dengan tjara lain, yakni sebagai organisasi dibawah tanah.

Terpelihara djuga persatuan batin antara rombongan² jang menjerah dengan pemuda² jang meneruskan gerakan² gerilja, berkat kebidjaksanaan dan pimpinan Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai, tetapi tindakan tsb. tetap berarti kemunduran bagi perdjongan kita, karena setelah petjah front politik non koperasi, sehingga Belanda dapat menjusun pemerintahan, maka penjerahan pemuda² itu memperbesar kemencangan politik psychologis Belanda.

Setelah kemenangan politik psychologis itu, maka menjusullah gerakan militer setjara besar besaran. Belanda bertindak dimana-mana, dikota-kota dan dipedalaman.

Pada tanggal 20 Nopember terdjadi *peristiwa Marga*, yakni suatu pertempuran terbesar di Bali selama perdjongan, sehingga hampir semua pimpinan dan pelopor² kemerdekaan gugur atau tertawan.

Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai gugur sebagai pahlawan bersama deungan semua anak-buahnja.

PERISTIWA 40.000 KORBAN WESTERLING

Dengan „membontjeng” pada pasukan² Australia, jang ditugaskan melutjuti tentara Djepang di Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Nusatenggara, maka Belanda berhasil memasukkan pasukan-pasukannya didaerah-daerah tersebut, sehingga pada tgl. 15 Djuli 1946. Sekutu dapat menjerahkan kekuasaannya atas daerah² itu kepada Belanda dikota Makasar.

Namun demikian, diluar kota² ternjata masih berkuasa Lasjkar² Gerilja kita, jang pada malam hari sering menjusup kedalam kota dan menimbulkan kekatjauan. Oleh karena itu Kapten Westerling dengan pasukannya ditugaskan membinasakan Lasjkar² Gerilja itu. Terdorong oleh kedjengkelan dan kemarahan karena tidak dapat menjelesaikan tugasnja itu, maka timbullah dalam otak Westerling ilham dari Sjaitan untuk menumpahkan kebuasannya terhadap rakjat biasa jang tak herdosa. Di berpuluh-puluh desa ia mengumpulkan semua penduduknja, laki², perempuan dan anak² disuatu lapangan; kemudian bertanja dimana tersembunji Lasjkar² Gerilja. Karena tidak seorangpun suka mendjawabnja, maka ia perintahkan kepada pasukannya untuk melepaskan tembakan senapan kepada kumpulan orang² jang tidak berdaja itu.

Tjara „pembersihan” jang melampaui segala batas peri kemasniaan itu dimulai pada tanggal 11 Desember 1946, berturut-turut selama 3 bulan, sehingga menimbulkan korban djiwa sedjumlah 40.000.

Itulah sebabnja tiap² tahun pada tanggal 11 Desember kita peringati peristiwa korban 40.000 djiwa di Sulawesi Selatan itu sebagai „Hari Berkabung”.

„Badan Keamanan Rakjat” melalui „Tentara Keamanan Rakjat” mendjelma mendjadi Tentara Republik Indonesia”, dan achirnja mendjadi „Tentara Nasional Indonesia”.

Untuk menggambarkan sedjarah perkembangan „Badan Keamanan Rakjat” melalui „Tentara Keamanan Rakjat” hingga mendjelma mendjadi „Tentara Republik Indonesia” baiklah kiranja saja kutip hampir seluruhnja dari buku Djendral A.H. Nasution jang telah saja sebutkan dimuka.

Pada saat barisan² pemuda bersendjata sedang melutjuti Djepang dipelbagai daerah, pula pada saat pertempuran² melawan Nica sudah terdjadi dikota-kota besar, pula pada saat pasukan² Sekutu jang pertama mendarat, maka pemerintah memanggil bekas Major Knil Urip Sumohardjo ke Djakarta, dimana ia menerima *pengangkatannja* dari tangan Wakil Presiden Hatta mendjadi kepala staf umum dan ditugaskan untuk membentuk tentara.

Mari kita ikuti maklumat² resmi jang mengantar kelahiran TKR dewasa itu.

MAKLUMAT PEMERINTAH

Untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka *diadakan* satu *Tentara Keamanan Rakjat*.

Djakarta, 5 Oktober 1945.

Presiden Republik Indonesia

Soekarno

MAKLUMAT PEMERINTAH

Sebagai Menteri Keamanan Rakjat diangkat :
Suprijadi

Djakarta, 6 Oktober 1945.
Presiden Republik Indonesia
Sukarno

PENGUMUMAN PEMERINTAH

Ini hari telah dilakukan pembentukan Tentara Kebangsaan disalah satu daerah dekat Djakarta dengan maksud untuk menjempurnakan kekuatan Republik Indonesia.

Pemuda² bekas Peta, Heiho, Kaigun Heiho dan pemuda² dari Barisan Pelopor telah menjiapkan tenaganja, agar setiap waktu dapat membaktikan tenaganja untuk menentang kembalinja pendjadjahan Belanda.

Pemuda² jang masuk Tentara Kebangsaan itu dengan segera diperlengkapi dengan persendjataan, agar dengan djalan demikian dapat mempertahankan keamanan umum.

Djakarta, 7 Oktober 1945.

MOBILISASI TENTARA KEAMANAN RAKJAT

Untuk mendjaga keamanan rakjat pada dewasa ini oleh Presiden Republik Indonesia telah diperintahkan pembentukan Tentara Keamanan Rakjat. Tentara ini terdiri atas rakjat Indonesia jang berperasaan penuh tanggung djawab atas keamanan masjarakat Indonesia dan guna mendjaga kehormatan negara Republik Indonesia.

Pemuda dan lain-lainnja jang tegap sentosa badan dan djiwanja, bekas *pradjurit Peta, pradjurit Hindia Belanda dan Heiho, Kaigun Heiho, Barisan Pemuda, Hisbullah, Pelopor dan lain²*, baik jang sudah maupun jang belum pernah memperoleh latihan militer, supaja selekas-lekasnja mendaftarkan diri pada kantor BKN diibu kota kabupaten masing², atau pada badan lain-lainnja jang ditunjuk oleh residen (kepala daerah) atau wakilnja.
Merdeka !

Djakarta, 9 Oktober 1945.
Komite Nasional Pusat
Ketua
Kasman Siugodimedjo SH

Kemudian pada tanggal 20 Oktober 1945 diumumkan :
Kementerian Keamanan Rakjat.

Telah diangkat oleh pemerintah Republik Indonesia putjuk pimpinan Kementerian Keamanan Rakjat, ialah sebagai berikut :

1. Menteri ad Interim : Muhammad Suljoedikusumo.
2. Pemimpin Tertinggi : Suprijadi.
3. Kepala Staf Umum : Major Urip Sumohardjo.

Selain itu *bekas opsir² tentara Hindia Belanda* meujatakan sikapnja dibelakang pemerintah Republik. Bahwa keinsjafan wadjib ikut mempertahankan Republik Indonesia merdeka sudah djuga meresap dihati sanubari segenap bekas opsir Indonesia dari tentara Belanda dahulu, dapat dinjatakan dalam maklumat mereka sbb. ini.

Djakarta, 14 Oktober 1945.

M a k l u m a t

Kami jang bertanda tangan dibawah ini, semua bekas opsir² tentara Hindia Belanda dahulu.

Menimbang :

- a. Bahwa menurut bunjinja proklamasi jang disebarkan dengan perantaraan radio pada tanggal 9 Maret 1942 dari panglima tentara Hindia Belanda dahulu Letnan Djendral Ter Poorten, tentara tersebut telah dibubarkan;
- b. Bahwa dengan sendirinja kami telah terbebas dari sumpah, jang kami pernah berikan pada waktu diangkat mendjabat opsir;
- c. Bahwa ternjata Nica dengan pembantu-pembantunja telah me-nimbulkan kerusuhan² jang sangat menggusarkan hati kami sebagai manusia dan warga Indonesia;
- d. Bahwa menurut kejakinan kami jang sedalam-dalamnja, gerakan Republik Indonesia adalah gerakan jang sesuai dengan kehendak seluruh bangsa Indonesia dan bukan keinginan dari satu golongan atau lapisan sadja;

Memutuskan :

1. Menjatakan bahwa kami sekalian berdiri dibelakang Republik Indonesia.
2. Menjatakan bahwa kami sekalian siap sedia menerima segala perintah, dengan segala kekuatan kami lahir dan batin.

Pada tanggal 17 Nopember 1945 Departemen Keamanan Rakjat menegaskan dasar dan sifat Tentara Keamanan Rakjat antara lain seperti berikut :

Pemuda Indonesia jang masuk Tentara Keamanan Rakjat mempunyai dasar dan kejakinan politik. Kejakinan ialah ingin menjumbangkan apa sadja jang ada padanja untuk mendjaga keamanan negaranja. Tentara Hindia Belanda dan Djepang dalam prinsipnja kosong daripada kejakinan politik. Tentara Hindia Belanda hanja sebagai alat sadja. Atau dimana perlu serdadu-serdadu bangsa Indonesia jang sadar membalikkan mulut bedilnja kearah Belanda atau Djepang. Kedjadian tahun 1926 dan 1944 di Blitar adalah buktinja.

Adakah bedanja antara orang jang berkejakinan dan kosong dari pada kejakinan? Bedanja sebagai bumi dan langit. Orang jang berkejakinan teguh, baginja lebih baik bantjur daripada hidup sebagai budak.

Membela kejakinan menundjukkan sifat, bahwa orang itu mempunyai watak tinggi dan mempunyai tjita². Karakter (watak) tadi terlukis didalam sembojannja, bahwa lebih baik pergi „kenekara ahirat” daripada masuk „neraka dunia”, jaitu hidup sebagai anak djadjahan.

Tjita-tjitanja ialah bahwa ia ingin Tanah Airnja, jang sudah merdeka itu, tetap merdeka.

Trimurti kejakinan, karakter dan tjita² ini dalam perdjoangan mempertegak Republik Indonesia tidak bisa dipisah-pisahkan.

Kalau kita melawat keluar negeri, kita melihat perbedaan antara pemuda nazi dan pemuda dari tentara merah Rusia.

Hampir seperti perbandingan tentara „Hindia Belanda” dengan Tentara Keamanan Rakjat. Didalam dada pemuda² tentara merah itu kita dapati kejakinan jang kuat. Semangat perdjoangan jang berhasil mengembalikan tentara Djerman sampai ke Berlin, meskipun pada permulaan perang tentara Hitler sudah masuk ke Moskow.

Djelaslah sekarang, bahwa perdjoangan jang tidak ada kejakinan pada achirnja akan gampang runtuhnja. Sebaliknya berdjoang jang didasarkan atas kejakinan selalu nampak keuletamja. Inilah jang membawa kemenangan.

Kita yakin, bahwa pemuda² jang masuk Tentara Keamanan Rakjat pada waktu ini semangatnjapun mirip semangat pemuda Rusia jang masuk tentara merah. -

Dengan ini kemenangan ada dipihak jang membela kebenaran dan keadilan.

Menolak serangan pendjajah !

Mengembalikan keamanan negara Republik Indonesia ! !

Departemen Keamanan Rakjat.

Djakarta, 17-11-1945

SUSUNAN T.K.R.

Setelah Letnan Djendral Urip Sumohardjo menerima pengangkatannja, maka segeralah beliau menjusun suatu markas besar unum, jang mendjadi bagian dari *Markas Tertinggi T. K. R. di Jogjakarta*. Markas tertinggi tersebut disusun menurut tjontoh Departemen Peperangan Knil di Bandung dahulu, hanja tidak mempunjai inspektur² kesendjataan infanteri, artileri dan kavaleri. Tiap kepala mendjadi Djendral Major. Markas tertinggi itu *mengadakan 10 Divisi di Djawa*, jang kemudian digabungkan dalam 3 komandemen. *Divisi I di Banten dan Bogor* dibawah komando *Kolonel Kisi Samun*, jang berkedudukan di Serang, (kemudian diadakan sementara oleh K.S.A.U. suatu Divisi XI untuk daerah Bogor dengan pimpinan Kolonel Abdul Kadir, dan pada achirnja Divisi I ini diperketjil djadi untuk Banten sadja; Bogor dimasukkan kedalam Divisi II dan Sukabumi-Tjiandjur kedalam Divisi III).

Divisi II bertanggung djawab atas daerah *Djakarta dan Tjirebon*, dengan pimpinan *Kolonel Asikin* jang berkedudukan di *Linggardjati* dan jang kemudian diganti oleh Kolonel Abdul Kadir. *Divisi III* bertugas di *Priangan* dengan pimpinan *Kolonel Arudji*, jang berkedudukan di *Bandung* dan jang kemudian digantikan oleh *Kolonel A.H. Nasution* pada achir bulan *Nopember 1945*. *Divisi IV* meliputi *Pekalongan, Semarang dan Pati* dengan pimpinan *Kolonel Djatikusumo*, jang berkedudukan di *Salatiga*. *Divisi V* untuk *Kedu dan Banjumas* dibawah komando *Kolonel Sudir-*

man, jang berkedudukan di Purwokerto, dan jang kemudian digantikan oleh Kolonel Sutirto. Divisi VI mempertahankan Madiun dan Kediri, dengan pimpinan Kolonel Sudiro jang berkedudukan di Kediri. Divisi VII untuk Bodjonegoro, Surabaja dan Madura, dipimpin oleh Djendral Major Jonosewojo, kemudian digantikan oleh Kolonel Sungkono, jang berkedudukan di Modjokerto. Divisi VIII meliputi Malang dan Besuki dengan pimpinan Djendral Major Sudjai, jang berkedudukan di Malang.

Divisi IX Istimewa — sesuai dengan adanja daerah istimewa jang meliputi Jogjakarta — dibawah komando Kolonel Sudarsono, jang berkedudukan dikota Jogjakarta. Dan Divisi V Istimewa untuk daerah istimewa Solo dengan pimpinan Kolonel Sutarto.

Tanggal 12 Nopember 1945 diadakan Konperensi T.K.R. dibawah pimpinan Kepala Staf Umum, Letnan Djendral Urip Sumohardjo. Konperensi mentjalonkan Kolonel Sudirman mendjadi Panglima Besar, maka tanggal 18 Desember 1945 Pemerintah mengangkat Kolonel Sudirman mendjadi Panglima Besar dengan pangkat Djendral.

Pada tanggal 1 Djanuari 1946 Pemerintah mengganti nama „Tentara Keamanan Rakjat” mendjadi Tentara Keselamatan Rakjat” dan „Kementerian (Departemen) Keamanan” mendjadi „Kementerian (Departemen) Pertahanan”.

Pada tanggal 22 Djanuari keluarlah dekrit Presiden Sukarno jang merobah Tentara Keselamatan Rakjat mendjadi Tentara Republik Indonesia. Dengan itu ditegaskan, bahwa T.K.R. harus menjesuaikan dirinja sebagai alat negara, alat Republik Indonesia, jang patuh kepada pimpinan negara, yakni Pemerintah Republik Indonesia.

Maklumat Pemerintah tanggal 26 Djanuari 1946 adalah salah satu putusan jang melahirkan harapan jang besar dikalangan tentara yakni jang berbunji sbb. :

Kami Presiden Republik Indonesia, setelah mendengar nasehat dari Dewan Kementerian jang berapat di Jogjakarta pada tanggal 24 Djanuari 1946; menimbang, bahwa didalam saat perdjoangan politik negara Republik Indonesia sekarang mesti diperhatikan kesatuan susunan ketentaraan.

Menetapkan :

1. Nama Tentara Keselamatan Rakjat, dahulu Tentara Keamanan Rakjat, dirobah djadi Tentara Republik Indonesia;

2. Tentara Republik Indonesia adalah satu-satunya organisasi militer negara Republik Indonesia;
3. Tentara Republik Indonesia akan disusun atas dasar militer internasional;
4. Tentara Keselamatan Rakyat yang sekarang, yang mulai hari pengumuman maklumat ini disebut Tentara Republik Indonesia, akan diperbaiki susunannya atas dasar dan bentuk ketentaraan yang sempurna;
5. Untuk melaksanakan pekerjaan yang disebut didalam futsal 4, maka oleh pemerintah akan diangkat sebuah panitia, yang terdiri dari para ahli militer dan ahli lain yang dianggap perlu.

Presiden Republik Indonesia
ttd.

Soekarno

Achirnya, dengan Penetapan Presiden tanggal 5 Mei 1947 diputuskan untuk mempersatukan T.R.I. dan Lasjkar² menjadi satu Organisasi Tentara, dan dengan Penetapan Presiden tanggal 3 Djuni 1947 sedjak hari itu disjahkanlah berdirinya organisasi Tentara itu dengan nama „Tentara Nasional Indonesia” (T.N.I.).

Perang Gerilja

Biarpun sedjak tanggal 26 Djanuari 1946 pasukan² bersenjata R.I. sudah berbentuk „Tentara yang resmi dan tersusun menurut norma² internasional, namun tjara mendjalankan tugasnya untuk membela dan mempertahankan Kemerdekaan Bangsa dan Negara tetap bersifat „perang gerilja”, dalam arti tidak atau djarang sekali bertempur setjara frontal, melainkan menjusup dan menjerang musuh dengan mendadak, atau mentjepat pasukan² musuh yang sedang berpatroli, kemudian berpentjar dan menjamar sebagai penduduk biasa ditengah-tengah rakyat, sesuai dengan gambaran yang diberikan Panglima Besar Sudirman, bahwa Tentara R.I. ditengah-tengah rakyat adalah laksana ikan didalam air.

Apabila Belanda selalu membanggakan bahwa tentaranya sesudah Clash kesatu dan Clash kedua telah menduduki seluruh wilayah Republik, maka kenjataanannya ialah bahwa Belanda hanya berkuasa didalam kota², sedang didesa-desa, terutama dipegunungan-

an tetap berkuasa alat² pemerintahan Republik dengan T.R.I. dan Lasjkar² Rakjat.

Itulah sebabnja, bahwa biarpun menurut Persetujuan Renville tentara kita harus meninggalkan Djawa Barat — dalam kenjataanja hauja sebagian sadjalah dari Divisi Siliwangi jang „berhidjrah” ke Djawa Tengah, sedang sisanja masih tetap bersarang di „kantong²²” melandjutkan siasat perang gerilja sebagai ikan didalam air.

Untuk sekedar mendapat gambaran bagaimana seorang Menteri bergerilja, baiklah kiranja saja sadjikan beberapa kutipan dari buku saja „Najaka-Lelana”, ditulis dalam bahasa Djawa bersjair, kemudian atas andjuran Djendral Nasution disertai terdjemahanja dalam bahasa Indonesia, jang memuat kisah perdjalanan saja sebagai „Menteri Gerilja”.

KINANTI

1. Besarlah keingimanku untuk, dalam bentuk sjair (Djawa) mentjeritakan apa jang ku- alami sedjak tentara Belanda berchianat melanggar djan- dji tanpa ultimatum menje- rang dengan mendadak Re- publik Indonesia.
1. dereng ing tyas angengidung apa kang wus sun alami wiwit wadyabala Landa chianat tjidja ing djandji njerang tan mawi wawarta Indonesia Republik.
2. Pada hari Minggu tanggal sembilanbelas Desember ta- hun Maséhi seribu sembilan ratus empat puluh delapan.
2. Jèku dawah dinten Minggu kaping sangalas njarengi Désémber ingkang wulannja warsa nut thun Maséhi sèwu sangang atus miwah kawan dasa wolu nenggih.
3. Digempurlah oleh pasukan kapalterbang Belanda lapa- nganterbang Maguwo, jang segera diduduki. Kemudian diseranglah Djokjakarta, ibu kota Negara.
3. duk samana kang ginempur déning motor-mabur Wlandi lapanganing kapal-terbang Maguwo trus den ebroki ladjeng sru njerang Ngajogya ibukotaning Nagari.
4. Setelah mendengar berita tentang serangan tersebut, bermufakatlah Pak Santo dan Pak Kasimo kedua-dua- nja Menteri, jang pada wak- tu itu berada di Solo, sedang menengok keluarganya.
4. duk mjarsa kang wus atempnr énggal anggènnja badami Pak Santo lan Pak Kasimo jèku kakalihuja Mentri kang nudju wonten ing Sala samja tuwi kulawargi
5. Jang telah dimufakati ialah segera kembali ke Djokja untuk memenuhi kewadji- ban karena para Menteri pasti akan berapat. Pukul delapan pagi bersama-sama berangkat dengan naik dua mobil.
5. kang dadi golonging rembug wangsul mring Jogja den aglis perlu netepi kwadajibau wit pra Mentri rapat pasti djam wolu éndjang gja bidal numpak auto kalih sami.

6. Setelah sampai didesa Krapjak, terletak dibarat daja Kartasura, terlihatlah dua kapalterbang, jang dengan hebat dan dengan suara gemuruh menjerang dua mobil jang sedang berdjalan.
7. Hantjurlah dua mobil itu, penuh dengan lobang bekas peluru. Sjukur para penumpang masih dapat perlindungan Tuhan, sehingga semuanya selamat, a).
8. Kemudian dengan naik kereta (b) kembali menudju ke Solo. Di Kartasura berdjumpa dengan Menteri Dalam Negeri Dokter Sukiman, jang djuga bermaksud pergi ke Djokja.
9. Ketiga Menteri bermufakat kembali ke Surakarta, karena sangat berbahaja untuk melanjutkan per-djalanan menudju Djokja sebab kapalterbang Belanda amat kedjam.
- a) Karena telah sempat meninggalkan mobil, dan berlindung dibawah segrombolan pohon bambu.
- b) Kereta sewaan jang di Sala disebut „andong”.
6. wau ta ingkang winuwus dupi praptèng Krapjak dési kidul kilén Kartasura dwi kapal-terbang kaèksi anjerang sarwa sru hébat swaranja anggegirisi.
7. auto kalih samya antjur pating tjomplong kena mimis tudjuné kang sami numpak begdja taksih dén ajomi ing Gusti kang Murbèng Alam wifudjeng samya basuki.
8. nuli numpak kréta wangsul ing Kartasura pinangsih Najaka Dokter Sukiman jèku Mentri Dalam Negri ingkang ugi gadah sedya nudju Ngajogja nagari.
9. Mentri tiga sami rudjuk wangsul Surakarta nagri wit tan luput ing bahaja jènna trus ngladjengken kapti marga kapal terbang Landa ganas kedjem anandangi.

MIDJIL

1. Pada waktu ada di Villa Brandaris terlihatlah sinar api menjala-njala, jang menandakan, bahwa di Solo sedang dilaksanakan siasat humi-hangus.
Pak Santo lalu ingat pada keluarganja jang ditinggal-kan (di Solo), dengan rasa sedih dalam hatinja ber-pesan seperti berikut.
 2. Aduh. Dinda ibunja anak-anakku, memang sedang di-takdirkan Tuhan, bahwa aku harus pisah dengan engkau untuk memenuhi kewajibanku sebagai Men-teri, harus melarikan diri agar tidak tertangkap oleh musuh.
 3. Itulah bukti betapa besar-lah tekadku untuk mentja-pai kebahagiaan bagi Bang-sa dan Negara, agar tetap ada jang memimpin mem-pertahankan kemerdekaan sampai kepada kemenang-an.
 4. Bertjerminlah aku pada Pendita Tjiptaning dalam tjeritera mana Raden Ar-djuna (dengan berohah na-ma mendjadi Pendita Tjip-taning) betapa keras di-léréng Gunung Indrakila, bersamadi Sudjud terhadap Tuhan Jang Maha Agung.
1. nalikanja neng villa Brandaris ngalud-alad katon bumiangus ing Solo tandané ladjeng enget maring kulawargi kang den tinggal sami ing batos sru trenjuh.
 2. duh diadjeng Iboné nakmami lagi dadi lakon ingsun kudu pisah lan slirané anetepi kwadjibaning Mentri sumingkir mung amrih tan tinukup mungsuh.
 3. jèku bukti gunging sedya mami nggajuh karahajon tumrap Bangsa sarta Nagarané amrih tetep ana kang minpin mardika binudi unggul djuritipun.
 4. kang sun télad Bagawan Tjip-taning Mintaraga lakon dyan Ardjuna auggentur tapané lelana 'ng Indrakila wukir amangun tatéki sumungkem Hjang Agung.

5. Jang terutama saja pikirkan dengan rasa sangat sedih, ialah anakku jang paling muda, bernama Atmodjo, karena biasanja tidur bersama dengan ajah/ibunja.
- 5 kang sun pikir tumrenjuh ing ati
anakku kang anom
si wuragil Atmodjo aramé
kulinané taksih dèn keloni
ugungan kepati nggulet rama ibu.
6. Hanja engkau, Dinda, djannganlah kundjung berdoa, mohon rachmat Tuhan agar dapat memelihara anak² kita semua, dapat mengatasi segala matjam kesukaran.
6. mung sira djeng jwa pegat
memudji
njenjuwun Hjang Manon
dèn bisaa momong putra kabèh
sun tewakup Allah kang supadi
teguh datan gigrig nanggurangi
kéwuh.

DURMA

1. Di Ganter tinggal dirumahnja kamitua, jang tjetilnja bukan main. Untuk semua jang disadjikannja diperhitungkan harganja. Bahkan untuk ambén jang dipindjamkannja baru ichlas setelah diperhitungkan harga-sewanja.
1. prapténg *Ganter* manggèn grija
kamituwa
kang tjetilé kepati
pinétung sadaja
apa suguhanira
dalah ambén kang sinilih
mawa paséwan
lagi rila njambutu.
2. Dua malam tinggal dirumahnja kamitua, lalu pindah kerumahnja Krama-Dul jang letaknja amat tersembunji. Tidak tersangka-sangka datanglah bahaya besar.
2. kalih dalu njaré wisma
kamituwa
nuli gja pindah sami
milih sanès grija
Krama-Dul karanira
grijané sanget andelik
datan kinira
bebaja ageng prapti.
3. Pada hari Kemis Pon tanggal dua puluh ampat bulan Pebruari pagi² benar Pak Peno dan Samodra pergi mandi kesebuah pantjuran jang tak djauh letaknja. Memang mendjadi kebiasaannja untuk mandi meruput pagi².
3. dinten Kamis Pon ping patlikur
tanggalnja
wulané Pébruari
gagat bangun éndjang
Pak Peno lan Samodra
siram suring kutjur lan tebih
pantji kulina
jèn siram mruput éndjing.

4. Sangat terkedjut mendengar letusan sendjata, dikira dari kawan sendiri. Ternjata tentara mnsuh berdjumlah enam puluh menjerbu Ganter dari gunung menerobos hutan, melalui djalan sunji.
4. sanget kagèt mireng ungeling
saudjata
kinira kantja sami
djebel bala mengsah
tjatjahira sawidak
njerbu Ganter saking redi
anratas wana
medal margi kang sepi.
5. Terlihat dari dalam rumah Pak Soepeno djalan, digiring Belanda, dengan gagah dan tegak, tanpa melihat kanan-kiri. Adapun Samodra tidak berdjumpa lagi.
5. sami ngintip katon djroning
wisma
Pak Soepeno lumaris
giniring Walanda
gagah tegak lampahnja
datan mawi nolah nolih
déné Samodra
wus tan pinanggih malih.
6. Tak lama kemudian terdengarlah dari djauh hunji senapan berkali-kali. Setelah pasti bahwa musuh sudah pergi, Kusni disuruh melihat. Sekembalinja menjampaikan berita, bahwa Pak Peno telah tewas.
6. datan dangu kapireng saking
tebihan
sungsun swaraning hedil
sawusnja tetéla
bilih mengsah wus késah
Kusni dinuta ningali
wangsul tur warta
Pak Peno wus ngemasi.
7. Karena belum pertjaja, maka Mahrup dan Mardja disuruh menjatakan djuga. Mereka membenarkan bahwa Pak Peno telah gugur ditembak dipelipis sebelah kiri. Semua jang dibunuh berdjumlah tudjuh.
7. tan pratjaja Mahrup lan
Mardja dinuta
sami njataken ugi
matur jekti njata
Pak Peno wus pralaja
sinandjata piling kiri
sadajanira
pitu kang den pedjahi.
8. Pada saat itu Pak Peno berpakaian serba bitam, berkumis pandjang berdjenggot tehal, karena lama tidak bertjukur. Musuh pasti mengira bahwa seorang waroklah jang dibunuh.
8. duk samana Pak Peno gem-
agemira
sarwa tjemeng sadyéki
rawisira pandjang
djénggot bréwok rungkudan
datan tjinukur wus lami
meksah angira
warok ingkang déa panggih,

9. Semua jang ditinggalkan merasa sangat sedih, mengutjurkan air-mata kehilangan kawan sedjati. Pak Peno pasti tak berterusterang bahwa ia berkedudukan Menteri, karena apabila berterusterang semua kawan-kawannya tentu tertangkap pula.
10. Pak Soepeno ternjata bertekad mengorbankan diri, sebagai pahlawan dan bunga Bangsa ichlas mempertaruhkan djiwanja agar kawan-kawannya selamat. Harum namanja pasti tertjatat untuk selama-lamanya.
11. Datanglah Pak Kebajan memberi nasehat supaya segera berangkat, karena musuh telah mengantjam, sesudah menjerang Liman akan kembali lagi ke Ganter, maka tjepat² masuklah dalam hutan.
9. sami trenjuh kang tinilar midjil waspa
kontjatan mitra jekti
Pak Peno tan blaka
jén lenggahnja Najaka
margi lamura den blakani
kewran sadaja
tinangkep mengsah sami.
10. duk samana Pak Soepeno nekad kurban
pahlawan luhur jekti
kusumaning Bangsa
rila ngetohkan djiwa
mrih kawanira basuki
arum asmanja
langgeng tjinatet pasti.
11. Pak Kebajan prapta atur pamrajoga
sigru hidal lumaris
wit pangantjam mengsah
sawusnja njerang Liman
badé wangsul Ganter malih
mila den énggal
midjil masuk wanadri.

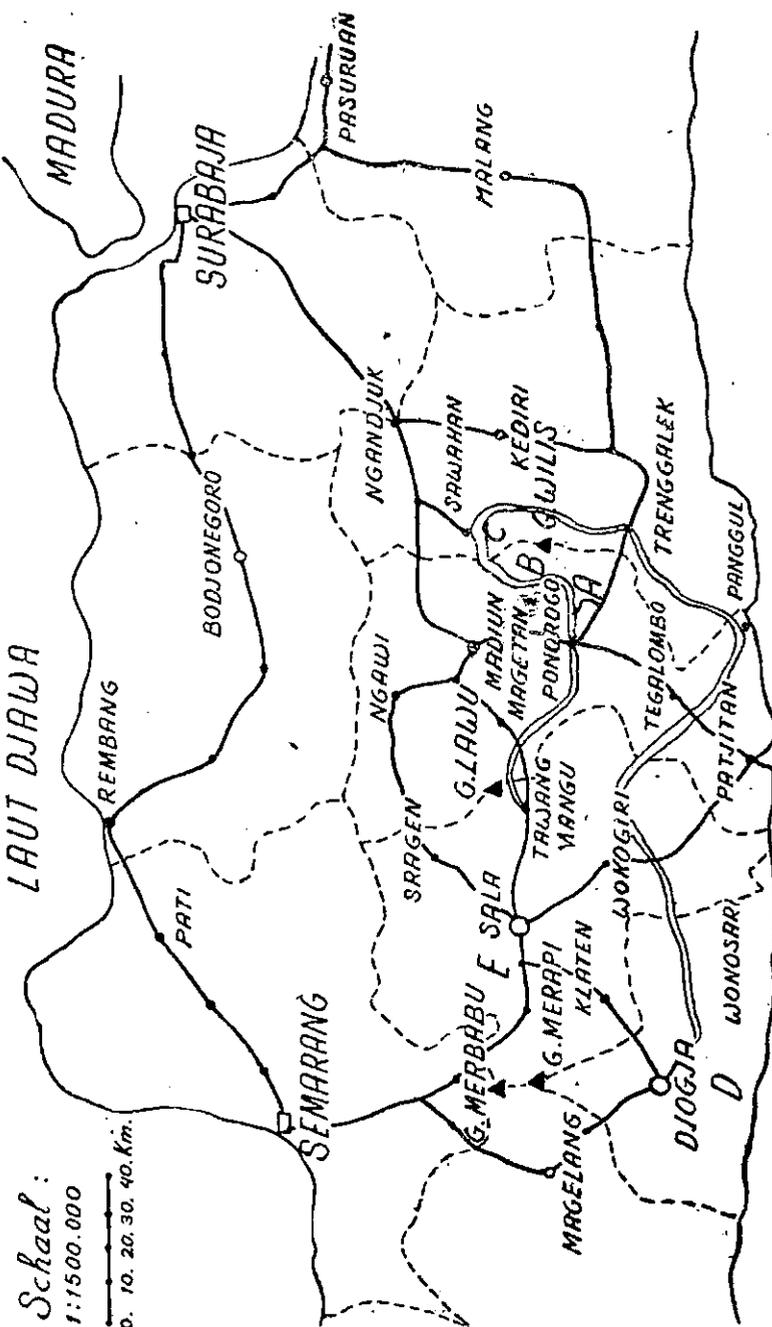
PUTJUNG

1. Tanggal delapan Djuli para lelana meninggalkan Tikén menudju ke Ketjamatan Semin, merasa gembira karena hampir masuk wilajah Djokja.
2. Mengutjap sjukur dengan perasaan lega „mak-plong” pada saat melalui batas Keresidenan Surakarta. karena masuk daerah Djokja, jang sudah ditinggalkan Belanda.
1. tanggal wolu wulan Djuli trus lumaku
Tikén wus tinilar
nudju nring Onderan Semin
sukéng drija mèh ngantjik
tlatah Ngajogja.
2. ngutjap sukur mak plong rinaosing kalbu
dupi pra lalana
wates Sala den langkungi
mandjing tlatah kang wus
tinilar Walanda.

3. Pada saat lohor tiba didesa Karangsari, singgah di Kelurahan, dimana Pak Tjamat Semin sedang berkonprénsi (dengan semua kepala-desa diwilajahnja). Atas permintaan Pak Tjamat Sang Najaka memberi amanat.
3. wantji beduk praptèng Karangsari dusun kampir kalurahan Pak Tjamat nudju konprénsi Sang Najaka sinuwun amedar sabda.
4. Pukul tiga tiba didesa Semin, tinggal dirumah kelurahan, amat puas dapat mengistirahatkan badan jang lelah.
4. wus djam telu praptèng Semin dusunipun nuli pra lalana lerem ing klurahan sami sanget lega saged ngasokken salira.
5. Esok harinja dua siswa segera diutus pergi menghadap Sri Sultan, menjampaikan surat resmi, jang intisariuja mobon dikirim kendaraan.
5. éndjangipun siswa kalih gja ingutus ngarsaning Sri Sultan ngaturken nawala resmi kang wosipun njuwun pinetuk tumpakan.
6. Dua hari kemudian dua siswa tiba kembali, menjampaikan berita, bahwa Sri Sultan merasa senang waktu mendengar Pak Santo akan segera datang.
6. let rong dalu duta kalih wangsul sampun ngaturken pawarta Sri Sultan sukéng panggalih dupi mjarsa Pak Santo wus énggal prapta.
7. Sri Sultan hermaksud akan pergi sendiri menjemput Pak Santo di Pijungan. Para lalana sangat gembira mendengar berita itu.
7. karsanipun pak Santo badé pinetuk Sri Sultan prijangga Saking Pijungan kang dési pra lalana duk mijarsa klangkung bingah.
8. Esok harinja pada fadjar menjingsing bertolak meninggalkan Semin, waktu sendja tiba didesa Sambipitu.
8. éndjangipun sami nrusken lampahipun mruput bangun éndjang gja bidal anilar Semin surup mandjing Sambipitu raning désa.

9. Kakinja Bu Sus kelihatan bengkok melentung; karena sudah terang tidak dapat lagi berdjalan kaki, maka ditandulah selandjutnja.
9. sukunipun Bu Sus katon sami réhning wus tetéla mlentung
 datan saged djalan kaki
 milanipun klakon tinandu lampahnja.
10. Para kawan lainnja masih kuat berdjalan terus, bahkan lebih tjepat, sepandjang djalan bertembang-berjanji, laksana tentara jang madju-berperang.
10. sanésipun maksih kijat mlampah terus
 malah langkung rikat
 turut margi nembang njanji
 lir tentara ingkang madjeng ing paprangan.
11. Tengah malam tiba didesa Pijungan, didjamu setjara mewah agak berlebih-lebihan, biarpun lelah tak terasa karena senang.
11. tengah dalu praptèng Pijungan kang dusun
 sami sinugata
 sanget rowa anglangkungi
 nadyan sajah tan rinaos margi bingah.
12. Esok harinja, hari Rebo tanggal tigabelas Djuli pukul delapan Sri Sultan tiba di Pijungan.
12. éndjangipun nudju Rebo dintenipun
 tanggal ping triwelas
 wulanira maksih Djuli
 tabuh wolu Sri Sultan praptèng Pijungan.
13. Sri Sultan dengan berkendaraan jeep mendjemput Sang Najaka, beliau menjetir sendiri. Keduanja merasa gembira berdjumpa dengan selamat.
13. Kang Sinuhun mobil jeep titihanipun
 metuk Sang Najaka
 angasta setir pribadi
 sami suka pinanggih sami rahardja.
14. Jang ikut naik jeep dengan Sri Sultan, Bu Sus dan Pak Santo, Pak Ananta serta Pak Hadi. Kawan² lainnja naik truk.
14. ingkang tumut nitih jeep sareng Sinuhun
 Bu Sus lan Pak Santo
 Pak Nanta tuwin Pak Hadi
 sanésipun sami anumpak mobil-prah.
15. Tak laima telah tiba dengan selamat dikota Djokja, terus langsung menghadap Pauduka Jang Mulia Bapak Presiden Soekarno.
15. datan dangu wus prapta kanti rahaju
 ing kita Ngajogja
 trus sowan ngarsanirèki
 Kang Minulja Bapak Presiden Soekarno.

16. Kemudian menudju rumah
kediamannja Jang Mulia
Perdana Menteri Bung
Hatta.
Keduanja merasa sangat
gembira.
16. ladjengipun sami nudju
dalemipun
Paduka Minulja
Bung Hatta Perdana Menteri
kalihipun sami sanget sukèng
drija.
17. Tamatlah tjeritanja Pak
Sañto, jang sangat sederha-
na, karena maksudnja tak
lain hanja untuk memberik-
kan kenang-kenangan kepa-
da istri dan putra-putranja.
17. tamat sampun Pak Santo tjari-
tanipun
kang sanget prasadja
wit tan sanès kang kaèsti
mung minaugka pepènget
mring garwa putra.



SAMUDERA - HINDIA

KETERANGAN :

- A --- BATAS KARESIDENAN
- B ——— DIALAN BESAR
- C PERJALANAN BERGERILJA
- D - · - · - BATAS KABUPATEN

A = desa Gontor bertemu dengan Menteri Agama K.H. Masjkur
 B = desa Banjuawa menemui Panglima Besar Sudirman
 C = desa Gontor, Menteri Supena ditangkap dan dibunuh Belanda
 D = desa Pitungan, didjempuit Sri Sultan
 E = Kartasura, mobil Menteri Susanto diserang pesawat terbang Belanda

PERANAN SRI SULTAN DALAM REVOLUSI

Sedjak dari permulaan Revolusi kita Sri Sultan Hamengku Buwono ke IX ternjata dapat menjesuaikan diri dengan tjita² dan suasana Revolusi itu.

Itulah sehabnja Pemerintah R.I., waktu memutuskan untuk meninggalkan Djakarta, memilih kota Djokjakarta mendjadi ibu-kota Negara Republik Indonesia.

Jang terutama mempertinggi kewibawaan Sri Sultan dimata Rakjat ialah sikapnja jang tegas dalam menghadapi tipu muslihat Belanda, setelah mereka berhasil menduduki Djokja pada Clash kedua, sikap mana telah memberikan kekuatan moril kepada T.R.I. dan Lasjkar² Rakjat untuk melandjutkan perdoanganja melawan Belanda.

Berita jang tersiar luas ialah bahwa Belanda berkali-kali menawarkan kepada Sri Sultan kedudukan jang tertinggi dalam pemerintahan Hindia Belanda, apabila Sri Sultan suka bekerdja sama dengan Belanda.

Namun, Sri Sultan dengan djiwa patriotnja jang kuat laksana badja tidak hanja menolak budjukan Belanda itu, bahkan permintaan untuk bertemu pun ditoloknja dengan tegas.

Sikap kesatria sedjati, inilah beserta hubungan jang erat antara Sri Sultan dan Sri Pakualam, jang bersedia menempati tempat kedua dalam pemerintahan gabungan Kasultanan dan Pakualam, jang mendorong Pemerintahan R.I. mengangkat Sri Sultan sebagai Kepala dan Sri Pakualam sebagai Wakil Kepala dari Daerah Istimewa bertingkat Propinsi Djokjakarta, sesuai dengan hasrat seluruh rakjat jang bersangkutan.

Lain halnja dengan perkembangan di Kasunanan dan Mangkunegaran di Karesidenan Surakarta. Tidak sadja terdapat „saingan” antara Sri Sunan dan Sri Mangkunegoro, namun kedua Radja itu ternjata berdjiwa lemah, karena tidak berdaja menolak tawaran Belanda sesudah Clash kedua untuk bekerdja sama dengan sipendjadjah.

Akihatnja ialah seluruh rakjat Surakarta tidak taat lagi kepada Radjanja, dan pasti akan berontak apabila Pemerintah R.I. memberikan kekuasaan memerintah kembali kepada kedua Bangsawan itu.

Disamping djabatannja sebagai Kepala Daerah Istimewa Djokjakarta, Sri Sultan djuga ditempatkan di Pemerintah Pusat sebagai

Menteri Negara dalam Kabinet ke IV (Perdana Menteri Sjahrir, dibentuk tanggal 2 Oktober 1946), dalam Kabinet ke V (Perdana Menteri Amir Sjarifudin SH, tanggal 3 Djuli 1947), dan dalam Kabinet ke VI (Perdana Menteri Bung Hatta, dibentuk tanggal 11 Nopember 1947), dan sebagai Menteri Koordinator Keamanan dalam Kabinet ke VII (Perdana Menteri Bung Hatta, dibentuk tanggal 29 Djanuari 1948), dalam Kabinet mana, setelah Pemerintahan Pusat lengkap kembali di Djokja, Sri Sultan sedjak tanggal 13 Djuli 1949 disertai pula pimpinan Departemen Pertahanan dan Departemen Pembangunan dan Pemuda.

REVOLUSI SOSIAL DI SUMATRA

Satu-satunya daerah di Indonesia, dimana rakjat, setelah Proklamasi Kemerdekaan, bertindak dengan kekerasan terhadap *kaum feodal*, ialah Sumatra Timur.

Rakjat memaksa para Sultan turun dari tahtannya, sehingga semua daerah² Kesultanan mendjadi daerah biasa, dengan pemerintahannya — atas nama Pemerintah Pusat — didjalankan oleh Gubernur, Residen, Bupati, Walikota, Wedana dan Tjamat.

Sangat disesalkan, bahwa dibagian terbesar dari Kesultanan² itu rakjat tidak hanya memberhentikan Sultannya, tetapi setjara kedjam² djuga membunuhnja. Peristiwa pembunuhan di Sumatra Timur itu dalam sedjarah Revolusi terkenal sebagai „Revolusi Sosial”.

TAMAN² PAHLAWAN

Setelah Perang dunia kedua berachir tanggal 15 Agustus 1945, dari Bangsa² terdjadjah di Asia hanya Indonesia dan Vietnam Utaralah jang merchut Kemerdekaannya dengan revolusi bersendjata.

Amerika Serikat menjatakan Philipina merdeka setjara damai, demikian djuga Inggris terhadap India, Pakistan, Burma, Sailand, Persekutuan Tanah Melaju dan Singapura, pun demikian pula Perantjis terhadap Laos, Kambodja dan Vietnam Selatan.

Vietnam Utara dengan pimpinan Ho Chi Ming berhatsil merebut Kemerdekaannya dengan kekerasan sendjata dari Perantjis jang bertekuk-lutut setelah bentengnja terachir jang sangat kuat, Dien Bien Fu, djatuh.

Indonesia mentjapai pengakuan kemerdekaannya oleh Belanda dengan perdjongan bersendjata dari 1945 hingga achir 1949.

Hingga kini sukarlah mendapatkan angka² jang pasti mengenai djumlah putra/putri Indonesia jang sebagai Kusuma Bangsa telah gugur dalam perdjongan bersendjata itu.

Namun, Taman² Pahlawan jang tersebar diseluruh tanah air Indonesia dapat sekedar memberikan gambaran bahwa djumlah pahlawan itu mendekati ratusan ribu, belum terhitung pedjoang² kemerdekaan jang djuga telah mengorbankan djiwanja tetapi tidak (atau belum) dimakamkan di Taman² Pahlawan.

Maka dari itu tepat benarlah apabila dalam upatjara² resmi memperingati Hari² Nasional, teristimewa pada Perajaan Hari Proklamasi Kemerdekaan selalu terdapat atjara „Mengheningkan Tjipta” untuk menghormat Pahlawan² kita jang telah gugur dalam membela menegakkan Kemerdekaan Bangsa dan Negara selama masa Revolusi Bersendjata.

B A B V

IRIAN BARAT

Uraian tentang Irian Barat ini tidak terbatas sampai tahun 1950, melainkan dilandjutkan sampai 1 Mei 1963, ialah saat masuknja Irian Barat kembali dibawah kekuasaan Republik Indonesia.

Masalah Irian Barat untuk pertama kali disinggung dalam Konperensi minoritas di Pangkalpinang dalam bulan Oktober 1946 oleh wakil golongan Indo Belanda Ir Wermuth, jang menjarankan supaja Irian Barat direservir untuk orang² Indo Belanda jang tidak suka hidup dibawah kekuasaan Republik Indonesia tetapi djuga tidak suka dipindahkan ke Nederland karena tidak tahan iklim dingin disana. Konperensi tidak mengambil keputusan tentang saran tadi.

Dalam Konperensi Denpasar dalam bulan Desember 1946 jang membitjarakan pembentukan negara boneka „Negara Indonesia Timur”, Irian Barat tidak dimasukkan dalam wilayah N.I.T. itu, tetapi tetap merupakan bagian dari Hindia Belanda, jang langsung diurus oleh Pemerintah Pusat Hindia Belanda di Djakarta.

Baik dalam Persetudjuan Linggardjati maupun dalam Persetudjuan Renville tidak disebut-sebut sama sekali masalah Irian Barat.

Baru dalam Konperensi Medja Bundar sekonjong-konjong Belanda minta supaja Irian Barat dikeluarkan dari wilayah Republik Indonesia Serikat, hal mana bertentangan dengan Pernjataan Rum — van Royen jang mengatakan bahwa penjerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat akan didjalankan setjara „penuh, tidak bersjarat dan tidak dapat ditarik kembali”.

Karena R.I.S. sudah harus terbentuk sebelum tanggal 1 Djanuari 1950, dan karena itu K.M.B. harus segera selesai, maka penjerahan kedaulatan atas Irian Barat ditunda satu tahun.

Kemudian ternjatalah bahwa Belanda mengingkari penundaan hanja selama satu tahun itu, dan karena itu timbullah sengketa Irian Barat.

Duabelas tahun kita telah berusaha dengan djalan perundingan, baik didalam maupun diluar P.B.B., supaja Belanda menjerahkan Irian Barat dalam kekuasaan kita, namun selalu sia² helaka.

Karena kesabaran kita ada batasnja, maka seluruh Bangsa Indonesia telah bertekad bulat, bahwa dengan djalan apapun djuga

sebelum tanggal 1 Djanuari 1963 Irian Barat harus sudah masuk kembali kedalam wilayah kekuasaan kita.

Atas andjuran Pedjabat Sekretaris Djendral P.B.B. U Thant, bekas Dutabesar Amerika Serikat untuk India Ellsworth Bunker, mengadakan kepada keduabelah pihak suatu usul penyelesaian, jang pada prinsipnja memuat ketentuan bahwa Belanda harus menjerahkan kekuasaan atas Irian Barat kepada Republik Indonesia, tidak langsung, tetapi melalui P.B.B. Penjerahan itu dilaksanakan setjara berangsur-angsur dan harus selesai selambat-lambatnja dalam djangka waktu 2 tahun.

Pemerintah R.I. telah menjatakan dapat menerima usul Bunker itu pada prinsipnja, dalam arti penjerahan melalui P.B.B., tetapi tentang waktunja, dalam tahun 1962 harus sudah selesai.

Sebaliknya Belanda tetap berkepala batu, tidak dengan tegas menerima atau menolak usul Bunker, tetapi dengan kedok melaksanakan hak „selfdetermination”, hak menentukan nasib sendiri, dari rakjat Irian Barat, tetap menghendaki supaja rakjat Irian Barat didengarkan keinginannja, sedang jang mampu mengeluarkan suaranya — akibat politik kolonial Belanda — hanja beberapa gelintir antek² Belanda sadja.

Dengan kedok selfdetermination itu Belanda berusaha mendirikan Negara Papua sebagai negara boneka, usaha mana kita tangkis dengan politik konfrontasi berupa Tri Komando Rakjat (Trikorja) pada tanggal 19 Desember 1961 jang berisi :

- I. Gagalakan Negara Papua;
- II. Kibarkan Sang Merah Putih diseluruh Irian Barat;
- III. Bersiaplah untuk mobilisasi umum;

Sebagai pelaksanaan Trikorja itu beribu-ribu geriljawan kita mendarat di Irian Barat, hal mana memaksakan Belanda menerima usul Bunker dengan menanda tangani Persetujuan New York tanggal 15 Agustus 1962.

Berdasarkan persetujuan itu pada tanggal 1 Oktober 1962 pemerintahan atas Irian Barat diserahkan oleh Belanda kepada P.B.B., dan pada tanggal 1 Mei 1963 oleh P.B.B. kepada Republik Indonesia.

B A B VI

USAHA KEARAH KONSOLIDASI NEGARA

Usaha pertama untuk menstabilisir Negara Republik Indonesia setelah diproklamasikan ialah keputusan „Panitya Persiapan Kemerdekaan Indonesia” tanggal 18 Agustus 1945 jang :

- I. Menetapkan Undang² Dasar R.I. 1945, jang rantjangannja telah dipersiapkan oleh „Panitya Penjelidik Kemerdekaan Indonesia” dibawah pimpinan Dr Radjiman Wediodiningrat;
- II. Memilih Ir Soekarno sebagai Presiden dan Drs Mohamad Hatta sebagai Wakil Presiden.

Pada tanggal 19 Agustus 1945 Presiden mengisi djabatan² Pemerintah Pusat dan Daerah seperti berikut :

- | | | |
|------------------------------------|---|--|
| 1. Menteri Dalam Negeri | : | R.A.A. Wiranatakusumah |
| 2. Menteri Luar Negeri | : | A. Soebardjo SH |
| 3. Menteri Kehakiman | : | Dr Soepomo SH |
| 4. Menteri Kemakmuran | : | Ir R.P. Soerachman |
| 5. Menteri Keuangan | : | Dr Samsi, jang kemudian diganti Maramis SH |
| 6. Menteri Kesehatan | : | Dr Buntaran |
| 7. Menteri Pengadjaran | : | Ki Hadjar Dewantara |
| 8. Menteri Sosial | : | Iwa Kusuma Sumantri SH |
| 9. Menteri Pertahanan | : | belum diangkat |
| 10. Menteri Penerangan | : | Amir Sjarifudin SH |
| 11. Menteri Pekerdjaan Umum | : | R. Abikusno Tjokrosujoso |
| 12. Menteri Perhubungan ad interim | : | R. Abikusno Tjokrosujoso |

Menteri² Negara :

1. Dr Amir
2. Kijai Wachid Hasjim
3. Sartono SH
4. A.A. Maramis SH (kemudian Menteri Keuangan)
5. R. Oto Iskandardinata

- | | | |
|----------------------|---|-----------------------|
| Ketua Mahkamah Agung | : | Dr Kusuma Atmadja SH |
| Djaksa Agung | : | Gatot SH |
| Sekretaris Negara | : | A. G. Pringgodigdo SH |
| Djurubitjara Negara | : | Sukardjo Wirjopranoto |

Para Gubernur :

- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| 1. Djawa Barat | : Soetardjo Kartohadikusumo |
| 2. Djawa Tengah | : R.P. Soeroso |
| 3. Djawa Timur | : R.M.T.A. Soeryo |
| 4. Sumatra | : Teuku Mohamad Hasan SH |
| 5. Kalimantan | : Ir Pangeran Mohamad Noer |
| 6. Sulawesi | : Dr G.S.S.J. Ratoelangi |
| 7. Sunda Ketjil | : Gusti Ktoet Pudja SH |
| 8. Maluku | : J. Latuharhary SH |

Para Residen,

- | | |
|-----------------|--------------------------------|
| 1. Banten | : R. Ng Tirtasoejatna |
| 2. Djakarta | : Soetardjo Kartohadikusumo |
| 3. Priangan | : R. Poeradiredja |
| 4. Bogor | : R. Ijok Mohamad Siradz |
| 5. Tjirehon | : R.M.A. Soeriatanoedibrata |
| 6. Banjumas | : R.P. Iskaq Tjokroadioerjo SH |
| 7. Semarang | : K.R.M. Wongsonegoro SH |
| 8. Kedu | : R.P. Soeroso |
| 9. Pati | : R.T.A. Milono |
| 10. Madiun | : R.M.T.A. Koesnindar |
| 11. Kediri | : R. Pratalikrama |
| 12. Bodjonegoro | : R.M.T.A. Soeryo |
| 13. Surabaya | : R. Soedirman |
| 14. Besuki | : Budiarto SH |
| 15. Madura | : R.A.A. Tjakraningrat |
| 16. Malang | : R.P. Singgih SH |

Pada tanggal 22 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia membentuk *Komit  Nasional Indonesia Pusat*, dan memerintahkan Komite² Nasional Daerah diseluruh Indonesia, dengan tugas :

- Menjatakan kehendak rakjat Indonesia untuk hidup sebagai bangsa jang merdeka;
- Mempersatukan rakjat dari segala lapisan supaja terpadu pada segala tempat diseluruh Indonesia persatuan kebangsaan jang bulat dan erat;

- c. Membantu menenteramkan rakyat, dan turut mendjaga keselamatan umum;
- d. Membantu Pemimpin dalam menjelenggarakan tjita² Bangsa Indonesia, dan didaerah membantu Pemerintah Daerah untuk kesedjahteraan umum.

Pada tanggal 29 Agustus 1945 Presiden melantik herdirinja Komité Nasional Indonesia Pusat (K.N.I.P.) dengan Kasman Singodimedjo SH sebagai Ketuanja.

Pada tanggal 25 September 1945 Presiden mengangkat para anggota dan Ketua *Dewan Pertimbangan Agung* :

1. Dr K.R.T. Radjiman Wediodiningrat
2. Sjech Djamil Djambek
3. Hadji Agus Salim
4. K.R.M.T.A. Wurjaningrat
5. Hadji Adnan
6. R.M. Margono Djojohadikusumo
7. Mohamad Enoch
8. Dr Latumeten
9. Ir Pangeran Mob. Noer.
10. Dr Sukiman Wirjosandjojo
11. Nj. Soerwarni Pringgodigdo

R.M. Margono ditundjuk sebagai Ketua.

Pada tanggal 16 Oktober 1945 K.N.I.P. mengambil keputusan supaya Kabinet bersifat Parlementer dengan pertanggungan djawab para Menteri kepada Badan Pekerdja K.N.I.P. jang disertai pekerdjaan sehari-hari dan diberi kekuasaan legislatif.

Maka, untuk memenuhi keputusan K.N.I.P. itu, ditetapkanlah *Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 nr X* jang berbunji seperti berikut :

Maklumat Wakil Presiden No. X

KOMITE NASIONAL PUSAT
Pemberian kekuasaan legislatif
kepada Komite Nasional Pusat.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SESUDAH MENDENGAR pemitjaraan oleh Komite Nasional Pusat tentang usul supaya sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat dibentuk *kekuasaannya* jang *hingga sekarang* *didjalankan* oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional menurut pasal IV Aturan Peralihan dari Undang-Undang Dasar *hendaknja* *dikerdjakan* oleh Komite Nasional Pusat dan supaya pekerdjaan Komite Nasional Pusat itu sehari-harinja berhubung dengan gentingnja keadaan *didjalankan* oleh sebuah Badan bernama *Dewan Pekerdja* jang bertanggung-djawab kepada Komite Nasional Pusat.

MENIMBANG bahwa didalam keadaan jang genting ini perlu ada Badan jang ikut bertanggung-djawab tentang nasib bangsa Indonesia, disebelah Pemerintah ;

MENIMBANG selandjutnja bahwa usul tadi berdasarkan paham kedaulatan rakjat ;

Memutuskan :

Bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat *diserahi kekuasaan legislatif* dan ikut menetapkan garis² besar daripada haluan Negara, serta menjetudju bahwa pekerdjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnja keadaan *didjalankan* oleh sebuah Badan Pekerdja jang dipilih diantara mereka dan jang bertanggung-djawab kepada Komite Nasional Pusat.

Djakarta, 16 Oktober 1945
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MOHAMMAD HATTA

Kemudian pada tanggal 14 Nopember 1945 Kabinet pertama yang bersifat Presidensiil diganti dengan Kabinet baru yang bersifat Parlementer dengan susunan :

1. Perdana Menteri, merangkap
2. Menteri Dalam Negeri dan
3. Menteri Luar Negeri : Sutan Sjahrir
4. Menteri Penerangan : Mohamad Natsir
5. Menteri Keamanan Rakjat : Amir Sjarifudin SH
6. Menteri Keuangan : Ir Soerachman
7. Menteri Kesehatan : Dr Darmasetiawan
8. Menteri Sosial : Dr Adjidarmo (kemudian diganti Dr Soedarsono)
9. Menteri Perhubungan : Ir Abdulkarim
10. Menteri Kehakiman : Soewandi SH
11. Menteri Pengadjaran : Dr Sutan Gunung Mulia SH
12. Menteri Pekerdjaan Umum : Ir Putuhena
13. Menteri Kemakmuran : Ir Darmawan
14. Menteri Ncgara : H. Rasjidi

Kurang bermanfaat kiranya mengisahkan pergantian² Kabinet, yang sampai terbentuknja Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 telah terdjadi hingga 8 kali.

Konsolidasi R.I. terhadap dunia luar

a. Pada waktu pasukan Inggris mendarat di Djakarta tanggal 29 September 1945, maka Letnan Djendral Christison mengumumkan sebagai tugasnja :

- I. Membebaskan orang² Belanda dan Indonesia yang ditawan atau diinternir oleh Djepang;
- II. Melutjuti pasukan² Djepang, dan mengirimkan kembali kenegerinja;
- III. Memberikan ketertiban dan keamanan umum, agar tugas ke-I dan ke-II tadi dapat dilaksanakan.

Pada tanggal 24 Desember 1945 atas permintaan Djendral Christison Pemerintah R.I. memberikan tugas kepada Tentara Keamanan Rakjat untuk mengangkut pasukan² Djepang dan orang² yang diinternir Djepang dari pedalaman kepantai, tugas

mana telah didjalankan oleh T.K.R. dengan sangat memuaskan hal mana membuktikan bahwa *Pemerintah R.I. mampu mengerdjakan sesuatu jang sebenarnya mendjadi tugas tentara Inggris.*

- b. Pemerintah R.I. pada tanggal 12 April 1946 menawarkan *bantuan beras sebanjuk 500 ribu ton kepada India*, jang sedang mengalami bahaya kelaparan, suatu tindakan kemanusiaan jang dapat sambutan baik dari Pemerintah India chususnja dan dari seluruh dunia pada umumnja.
- c. Agar diketahui benar bagaimanakah *sikap Pemerintah R.I.* pada umumnya dan *terhadap dunia luar* pada chususnja, maka diumumkanlah *Maklumat Politik tanggal 1 Nopember 1945* jang berbunyi seluruhnja seperti : „jang antara lain menjatakan, bahwa kita tidak membentji bangsa asing, bahkan mengharap bantuan tehnik dan keuangan dari dunia luar”.

Untuk membuktikan bahwa Republik Indonesia adalah Negara jang demokratis, maka diumumkan *Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang andjuran pembentukan partai² politik :*

„Berhubung dengan usul Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat, supaja diberikan kesempatan kepada Rakjat seluas-luasnja untuk mendirikan partai² politik, dengan restriksi, bahwa partai² itu hendak memperkuat perdjoangan kita mempertahankan kemerdekaan dan mendjamin keamanan masjarakat, Pemerintah menegaskan pendiriannya, bahwa :

1. *Pemerintah menjukai timbulnja partai² politik*, karena dengan adanya partai² itulah dapat dipimpin kedjalan jang teratur segala aliran paham jang ada dalam masjarakat;
2. *Pemerintah berharap supaja partai² itu telah tersusun sebelumnya dilangsungkan pemilihan anggota Badan² Perwakilan Rakjat pada bulan Djanuari 1946”.*
Memenuhi andjuran Pemerintah tersebut, maka didirikanlah partai² baru atau dihidupkan kembali partai² lama :

A. *Dengan dasar Ketuhanan*

1. Partai Politik Islam Indonesia „Masjumi”
2. Partai Sarekat Islam Indonesia (P.S.I.I.)
3. Partai Katbolik Republik Indonesia (P.K.R.I.)
4. Partai Kristen Indonesia (Parkindo)

B. Dengan dasar Kebangsaan

1. Partai Nasional Indonesia (P.N.I.)
2. Partai Persatuan Indonesia Raya (P.I.R.)
3. Partai Indonesia Raya (Parindra)
4. Partai Wanita Rakjat

C. Dengan dasar Marxisme

1. Partai Komunis Indonesia (P.K.I.)
2. Partai Sosialis
3. Partai Sosialis Indonesia (P.S.I.)
4. Partai Murba
5. Partai Buruh
6. Partai Buruh Indonesia

Bahaya dari dalam

Selama masa 17 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949 Republik Indonesia mengalami dua kali pertjobaan merebut kekuasaan Pemerintah, ialah „*Peristiwa Tiga Djuli*” dan „*Pemberontakan P.K.I. di Madiun*”.

Peristiwa Tiga Djuli

Dikalangan tokoh² politik (antaranja Iwa Kusuma Sumantri SH, Subardjo SH, Mohammad Yamin SH, Budiarto SH, dan Dr Buntaran) dengan pimpinan Tan Malaka (dibelakang lajar) timbul kegelisahan terhadap politik Kabinet Sjahrir, jang dalam nota djawabannja tanggal 27 Maret 1946 atas usul van Mook hanja menuntut pengakuan kedaulatan de facto R.I. atas Djawa dan Sumatra, karena mereka menghendaki kemerdekaan penuh atas seluruh bekas wilayah Hindia Belanda.

Karena kegelisahan tadi, maka pada tanggal 27 Djuni 1946 Sjahrir ditjulik oleh suatu rombongan jang tidak bertanggung djawab, sehingga pada tanggal 29 Djuni Presiden Soekarno mengambil seluruh kekuasaan ditanganja sampai pulih kembali keadaan biasa.

Atas seruan Presiden melalui pidato radio untuk mengembalikan Sutan Sjahrir, maka pada tanggal 1 Djuli Sjahrir dikembalikan dengan selamat.

Komplotan yang menentang politik Sjahrir berhasil menjeret didalamnya Panglima Divisi IX untuk Daerah Istimewa Djakarta, Major Djendral Soedarsono dan pada tanggal 3 Djuli 1946, mereka dengan pimpinan Panglima Soedarsono menjerbu Istana Presiden dan menjodorkan kepada Presiden suatu daftar Menteri² baru, untuk ditandatangani.

Presiden menolak tuntutan tadi, dan komplotan dapat ditangkap, kemudian diadjudkan dimuka Pengadilan yang menjatuhkan hukuman pendjara selama beberapa tahun.

Setelah mereka mendjalani sebagian dari hukumaunja, maka pada Perajaan Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1948 Presiden membebaskan mereka dengan pemberian grasi.

PEMBERONTAKAN P.K.I. DI MADIUN

Pada awal bulan Agustus 1948 tiba kembali di Indonesia dari Eropa Muso dan Suripno. Mereka berhasil menarik dalam P.K.I. tokoh² Partai Sosialis, antara lain Amir Sjarifudin SH dan Maruto Darusman, kemudian melunturkan agitasi hebat terhadap Pemerintah yang dituduh berpolitik kapitulasi kepada Belanda.

Pada tanggal 22 Agustus 1948 Muso dalam rapat umum di Djokja menuntut supaya perundingan dengan Belanda dihentikan, supaya diadakan penukaran duta dengan Rusia, dan supaya 1/3 dari Kabinet disediakan untuk anggota² P.K.I.

Pada tanggal 18 September 1948 P.K.I. memberontak di Madiun, merebut kekuasaan dari alat² Pemerintah.

Pemerintah menolak dengan tegas tawaran Belanda untuk membantu menumpas pemberontakan di Madiun, karena sanggup dan mampu membereskan sendiri.

Pasukan² divisi Siliwangi berhasil dengan segera merebut kembali daerah² Kabupaten Madiun, Magetan dan Ponorogo, dan dengan terbunuhnja Muso pada tanggal 31 Oktober 1948 selesai tertindas pemberontakan P.K.I. di Madiun.

B A B VII

DARI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT KEMBALI KE NEGARA KESATUAN R.I.

Setelah Republik Indonesia Serikat dibentuk pada tanggal 27 Desember 1949, maka Assaat SH sebagai Pedjabat Presiden Republik Indonesia sebagai Negara Bagian menundjuk 3 orang mendjadi Formateur Kabinet, ialah Dr Halim, Sdr. Abdulkhakim dan saja (Drs Susanto Tirtoprodjo SH).

Para Formateur Kabinet berhasil membentuk Kabinet dengan susunan :

Perdana Menteri	: Dr A. Halim
Wakil Perdana Menteri	: Abdulkhakim
Menteri Dalam Negeri	: Drs Susanto Tirtoprodjo SH
Menteri Keuangan	: Lukman Hakim SH
Menteri Perdagangan dan Perindustrian	: Tandiono Mann SH
Menteri Pertanian	: Sadjarwo
Menteri Pengadjaran	: Ki S. Mangunsarkoro
Menteri Agama	: H. Fakih Usman
Menteri Kehakiman	: A.G. Pringgodigdo SH
Menteri Penerangan	: Wiwoho Purbohadidjojo
Menteri Perburuhan	: Dr Maäs
Menteri Sosial	: Hamdani
Menteri Kesehatan	: Dr Sutopo
Menteri Pekerdjaan Umum dan Perhubungan	: Ir Sitompul
Menteri Pembedaan	: Sugondo Djojopuspito

Adapun bagian² terpenting dari Program Kabinet tersebut ialah :

- I. Meneruskan perdjuaan untuk mentjapai negara kesatuan, jang meliputi seluruh kepulauan Indonesia, dan jang dimaksud dalam Proklamasi 17 Agustus 1945;
- II. Melandjutkan pelaksanaan pasal 27 ayat 2 dan pasal 33 Undang² Dasar, serta menjelenggarakan politik buruh dan tani, berpedoman kepada pasal² tersebut.

Program ke I dengan mudah dapat dilaksanakan, karena rakjat dinegara-negara boneka bentukan van Mook ternyata berhasil memaksa Dewan² Perwakilan Rakjatnja, untuk menjatakan „menggabungkan diri pada Republik Indonesia”, dengan mempergunakan pasal 44 dari Undang² Dasar R.I.S. jang memuat ketentuan bahwa sesuatu Negara (Daerah) Bagian dari R.I.S. dapat menggabungkan diri pada Negara (Daerah) Bagian lainnja.

Berturut-turut hampir semua negara² boneka sama menggabungkan diri pada R.I., sehingga pada pertengahan tahun 1950 R.I.S. hanja terdiri dari 3 Negara Bagian : R.I., Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur.

Diantara Pemerintah dari ketiga Negara Bagian itu dalam bulan Djuli 1950 tertjapailah persetudjuan untuk merobah bentuk federasi dari R.I.S. mendjadi bentuk Negara Kesatuan R.I., dengan mempergunakan pasal 190 Undang² Dasar R.I.S. jang memberi kemungkinan merobah Undang² Dasar tadi, sekalipun mengenai bentuk Negara.

Maka, setelah R.I.S. hidup hanja selama 8 bulan laksana „inter-mezzo” belaka, pada tanggal 17 Agustus 1950 berdirilah tegak kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B A B VIII

KATA PENUTUP

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menggantikan Republik Indonesia Serikat pada 17 Agustus 1950 belumlah merupakan Negara Proklamasi 1945, karena berlandaskan atas Undang² Dasar Sementara 1950 yang hanya merubah bentuk negara federal menjadi negara kesatuan, tetapi sistim pemerintahannya tetap bersifat Kabinet Parlemitter dalam arti Kabinet dipimpin oleh seorang Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintah disamping Presiden sebagai Kepala Negara.

Karena sistim Kabinet Parlemitter itu ternyata berakibat tidak stabilnya Pemerintah, sedang Konstituante yang bertugas menetapkan Undang² Dasar baru untuk menggantikan Undang² Dasar Sementara 1950, ternyata tidak mampu mengambil sesuatu keputusan, maka dengan *Dekret Presiden tgl. 5 Djuli 1959* dibubarkanlah Konstituante itu dan dinjatakan *berlaku kembali Undang² Dasar Proklamasi 1945*, yang memuat sistim Kabinet Presidensiil dalam arti Kabinet dipimpin langsung oleh Presiden Kepala Negara merangkap Kepala Pemerintah, sehingga terdjaminlah stabilitas dari Pemerintah.

Didalam Mukadimah atau Pembukaan dari Undang² Dasar 1945 tertjantumlah bahwa Dasar atau Filsafah Negara Republik Indonesia adalah

Pantjasila

terdiri dari :

1. Sila Ketuhanan Jang Maha Esa,
2. Sila Kemanusiaan jang adil dan beradab,
3. Sila Kebangsaan atau Persatuan Indonesia,
4. Sila Kerakjatan, dan
5. Sila Keadilan Sosial.

Haluan Negara

telah didjelaskan pada Peringatan Hari Kemerdekaan dalam Pidato Presiden Soekarno tgl. 17 Agustus 1959, yang merupakan :

Manifesto Politik, disingkat *Manipol* yang intisarinja tertjakup dalam istilah

Usdek

tersusun dari huruf² pertama dari :

1. Undang² Dasar 1945,
2. Sosialisme Indonesia,
3. Demokrasi Terpimpin,
4. Ekonomi Terpimpin, dan
5. Kepribadian Bangsa Indonesia.

Didalam Manipol antara lain ditandaskan :

Tiga Kerangka tujuan Revolusi Indonesia terdiri dari :

- I. Negara Kesatuan jang berwilajah dari Sabang hingga Merauke,
- II. Masjarakat jang adil dan makmur,
- III. Persahabatan dengan semua negara didunia untuk membentuk satu Dunia Baru jang bersih dari imperialisme dan kolonialisme, menudju kepada Perdamaian Dunia jang sempurna.

Maklumat Politik

POLITIK PEMERINTAH. Haluan dari Politik Pemerintah Republik Indonesia, jang telah disetudjui oleh Badan Pekerdja Komite Nasional Indonesia.

Setelah lebih dari dua bulan lamanja kita dengan berbagai-bagai djalan menjatakan hendak hidup sebagai bangsa jang merdeka, pada saat kita menghadapi suasana baru didalam perdjjuangan kemerdekaan kita, pada saat dunia mendekati kita untuk memandaug lebih teliti diri dan pendirian kita, perlu kita madju kemuka dengan wadjah jang bersih dan dada terbuka, menundjukkan kebenaran kita jang tidak sadja berdasarkan keadilan dan peri-kemanusiaan melainkan pasti djuga berdasarkan atas akal serta perhitungan jang sehat.

Setelah Pemerintah Belanda di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1942 menjerah kepada militer Djepang di Bandung dengan hampir sama sekali tiada mengadakan perlawanan, maka tinggallah bangsa kita jang tidak bersendjata mendjadi umpan militerisme Djepang jang keras dan kedjam itu. Tiga setengah tahun lamanja rakjat kita menderita paksaan dan kekedjaman Djepang, seperti belum pernah dialaminja didjamau pendjadjahan Belanda herpuluh tahun jang terkemudian. Seluruh rakjat kita diperbuat seolah-olah barang jang murah jang diboroskan didalam peperangan. Dari rakjat djelata jang diperbudak dengan kerdja paksa dan hasil buminja dirampas, sampai ke kaum terpeladjar jang dipaksa berdjusta dan menipu rakjat, merasai genggaman militerismenja. *Kesengsaraan rakjat kita lahir dan batin didalam tiga setengah tahun ini boleh dikatakan tak terbatas.* Seluruh rakjat kita dipaksa berbaris dan tahu menerima perintah setjara militer. *Kepintaran militer inilah jang ditiinggalkan oleh pendjadjah Djepang sebagai djedjak didalam djiwa rakjat dan terutama didalam djiwa pemuda kita.*

Tanggungan pendjadjahan Belanda dalam hal ini adalah bahwa bangsa kita jang berdjumlah 70.000.000 djiwa setelah berabad „dididik“ oleh Belanda, pada tanggal 9 Maret 1942 diserahkan kepada militerisme Djepang didalam segala-segalanja tidak berdaja

untuk menghadapi kekuasaan dan kekerasan serta tipu muslihat propaganda Djepang, oleh karena rakjat kita belum pernah dipertjajai serta tidak pula dipertjajai perlengkapannya yang tjukup, untuk dapat menghadapi sendiri perputaran sedjarah seperti terdjadi pada tanggal 9 Maret 1942 itu.

BELADJAR MENGHARGAI DIRI SENDIRI

Tetapi didalam kesulitan yang sebesar-besarnya itu rakjat kita beladjar membanding pendjadjahan Belanda dengan sebenarnya, segala kekurangan tak pernah terasa setadjam dan sedjelas, ketika rakjat ditinggalkannya dengan tjara yang diperlihatkannya itu. Njata benar kelemahan dan kekosongan perumahan pendjadjahan Belanda.

Maka pada saat itu timbullah pada rakjat kita kesedaran baru, perasaan kebangsaan yang lebih tajam dari pada waktu yang lalu. Perasaan itu dipertadjam lagi oleh propaganda ke-Asiaan Djepang. Kekerasan yang dilakukan Djepang tidak menghambat tumbuhnya kesadaran kebangsaan Indonesia. Selama tiga setengah tahun pendjadjahan Djepang seluruh Negara serta perusahaan² yang dahulu dipimpin oleh Belanda, didjalankan oleh orang Indonesia, diawasi oleh orang Djepang, yang biasannya njata tidak tjakap.

Didalam kekedjaman dan kekerasan pendjadjahan Djepang itu rakjat dan bangsa kita beladjar menghargai dirinya sendiri, mempertadjam kesadaran kebangsaannya terhadap Djepang dan djuga terhadap bangsa asing lainnya. Berdjuta-djuta djiwa rakjat kita melajang, serta seluruh bangsa sengsara selama tiga setengah tahun oleh karena kekedjaman Djepang, akan tetapi djuga oleh karena kesalahan Belanda yang mengurbankan kita kepada kekerasan Djepang itu dengan tidak memungkinkan kita mempunyai alat pertahanan yang diperlukan.

Oleh karena itu maka sebenarnya pihak Belanda pada batinnya tidak berhak untuk menjalahkan orang² yang diserahkan pada kekedjaman Djepang itu, dengan tuduhan bekerdja-sama dengan Djepang, sedangkan orang Belanda sendiri didalam keadaan yang sama, umumnya lebih suka lagi melajani Djepang. Selain dari pada itu memang pula pembangunan perasaan kebangsaan kita itu ada djuga yang merupakan perlawanan terhadap kekerasan Djepang, setjara gelap dan djuga pemberontakan, sabotage dan lain-lain seperti dapat dibuktikan oleh ribuan orang gerakan kiri kita yang dihukum, dibunuh dan diburu.

Buktinja adalah pemberontakan di Tasikmalaja, di Indramaju, di Blitar, di Sumatra, di Kalimantan Barat d.l.l.

Sebagian lain dari kaum nasionalis kita jang menjelenggarakan kesedaran kebangsaan dengan djalan jang sjah, terpaksa bekerdja-sama dengan pihak Djepang, ikut berbaris serta berteriak didalam barisan² Djepang jang dibentuknja untuk keperluan perangnja.

Bagaimana kerasnja arus kebangsaan itu dapat pula dilihat pada golongan kaum nasionalis jang bekerdja-sama dengan Djepang itu, jang selamanja mempertahankan tjita² kerakjatannja, meskipun dipaksa berbaris didalam barisan totaliter Djepang. Hal ini dapat dibuktikan oleh Undang² Dasar jang njata benar dimaksudkan supaja berdasar kerakjatan, meskipun ia dirantjang oleh mereka didalam djaman pendjadjahan Djepang. Dengan pernyataan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 kesedaran kebangsaan Indonesia memuntjak mendjadi kemauan bangsa jang bulat untuk mewudjudkan kedaulatannja. Seluruh rakjat kita masuk tertarik kedalam gelombang kebangsaan jang besar itu.

BAGAIMANA DENGAN BELANDA ?

Penjerahan Djepang kepada Sekutu telah pula bermula. Bagi dunia, terutama bagi pihak jang telah mendirikan susunan United Nations di San Francisco timbul soal bagaimana hendak menempatkan kedaulatan Negeri Belanda jang diakuinja itu pada bangsa Indonesia jang telah menjatakan kedaulatannja sendiri.

Pada Konperensi-konperensi internasional pihak Belanda selalu mengemukakan, bahwa bangsa Indonesia sangat tjinta kepada Pemerintah Belanda, jang katanja bukan pemerintahan djadjahan. Akan tetapi njata sekarang pada dunia, bahwa djika Belanda hendak kembali mendjadi pemerintah di Indonesia lebih dahulu kemauan rakjat Indonesia jang sekarang telah dua bulan lamanja dinjatakan pada dunia dengan berbagai djalan, harus dihantjurkan dengan kekerasan, sehingga akan terdjadi pengurbanan djiwa jang tak ketjil djumlahnja. Njata bahwa kedaulatan Belanda atas Indonesia tidak akan dapat diwudjudkan, djika tidak dengan memperkosa maksud perdjandjian Atlantic Charter serta perdjandjian United Nations di San Francisco.

Sebenarnya pihak Belanda yang dengan begitu mudah menjerahkan nasib bangsa kita kepada kekerasan Djepang sekali-kali *moreel* tidak berhak lagi untuk kembali begitu saja di Indonesia, seolah-olah tidak terjadi apa² sejak tahun 1942, serta pula seakan akan ia tidak bersalah apa² dan segala harus kembali menjadi keadaan sebelum petjah perang.

Kehendak Belanda ini bertentangan dengan segala perasaan keadilan dan jika dibuarkan tentu harus dijalankan dengan perkosaan segala perasaan keadilan dan kemanusiaan. Menurut dasar² Charter San Francisco, maka Negara yang diberi tanggung jawab atas bangsa yang belum merdeka itu tidak mungkin menjalankan tanggung jawabnya dengan memperkosa dasar² Charter United Nations, itu sendiri.

Lebih lagi terasa kepintjangan keadaan ini, jika dilihat, bahwa pihak Belanda sama sekali tidak mempunyai jawab yang pantas terhadap kesulitan yang dihadapinya itu. Hingga sekarang belum sedikit juga ternjata, bahwa yang dikehendaki oleh Belanda itu lain dari pada pengembalian pendjadjahannya yang lama. meskipun ia mengumumkan keterangan Ratu Willhelmina yang diutjapkan pada tahun 1942. Untuk memaksakan tjara pemerintahan yang dimaksudkan oleh Belanda itu, ia tak mampu berbuat lain dari pada mengharap akan dapat mempergunakan kekuatan militer Sekutu yang datang memperlutjuti sendjata Djepang di Indonesia, sebagai alat untuk dapat melemahkan atau menghantjurkan kemauan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kedaulatannya sendiri terhadap Pemerintah yang hendak dipaksakan oleh pihak Belanda atas dirinja.

Akan tetapi, dengan semangat kebangsaan kita yang menjalannya. pasti pemerintahan Belanda itu meskipun memakai kekerasan militer yang modern, tidak akan dapat mentjegah bangsa kita untuk mempunyai Pemerintahan yang dipilihja sendiri.

Selama dunia tak mengetahui lain djalan untuk memerubi kewadjiannya terhadap anggapan kedaulatan Belanda atas Indonesia itu, dari pada menghantjurkan kemauan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibja sendiri, selama itu pula dunia tentu tidak akan dapat manfaat yang semestinja dari kekajaan Negeri dan Bangsa Indonesia.

Hal ini terlebih-lebih akan menjedilkan terhadap Negara² tetangga Indonesia, terutama Australia, Philipina dan Amerika Serikat.

Terlebih-lebih Amerika Serikat jang oleh seluruh Asia dan terutama oleh Indonesia diharapkan akan dapat memberi pertolongan jang sebesar-besarnja dikemudian hari, didalam usaha bangsa Indonesia memadjukan negaranja serta penghidupan rakyatnja.

Umpamanja dengan pertolongan industri besar Amerika serta kredit Amerika dan pembelian barang mentahnja jang banjak itu.

SIKAP BANGSA KITA !

Kita orang Indonesia didalam usaha hendak menjempurnakan kedudukan bangsa kita, tidak perlu menggunakan kekerasan. Djika ada kekerasan terdjadi ialah tak lain oleh karena pihak Belanda memerlukan memakai kekerasan terhadap bangsa kita supaya dapat memaksakan kehendaknja atas kita.

Dipihak kita tidak ada keinginan untuk memaksa bangsa lain, kita hauja berkehendak diberi kemerdekaan, dibiarkan menjempurnakan susunan negara kita sendiri.

KITA MENGETAHUI BAIWA KEDUDUKAN NEGERI KITA MELETAKKAN SATU TANGGUNG DJAWAB JANG BESAR DIBAHU KITA TERHADAP KELUARGA DUNIA. KITA TIDAK MEMBENTJI RANGSA ASING. DJUGA TIDAK BENTJI KEPADA BANGSA BELANDA, APALAGI ORANG INDO, AMBON ATAU MENADO JANG SEBENARNJA BANGSA KITA DJUGA, MALAHAN KITA MENGETAHUI DAN MENGETRI BESAR BAHWA UNTUK KEPERLUAN NEGERI DAN BANGSA KITA DIDALAM BEBERAPA TAHUN JANG AKAN DATANG INI, KITA AKAN MEMERLUKAN PERTOLONGAN BANGSA ASING DIDALAM PEMBANGUNAN NEGERI KITA BERUPA KAUM TEKNIK, DAN KAUM TERPELADJAR, PUN DJUGA KAPITAL ASING.

DIDALAM MEMENUHI KEPERLUAN ITU KITA TIDAK AKAN MENGHINDARKAN KENJATAAN BAIWA ORANG JANG BERBAHASA BELANDA JAITU ORANG BELANDA, MUNGKIN AKAN LEBIH BANJAK DIPERGUNAKAN OLEH KARENA MEREKA TELAH ADA DISINI DAN LEBIH BIASA AKAN KEADAAN DISINI, SEHINGGA PENGLAKSANAAN KEMERDEKAAN KITA ITU BELUM PERLU BERARTI KERUGIAN BESAR UNTUK PIHAK BELANDA, DJIKA DIUKUR DENGAN UANG ATAU DJIWA, AKAN TETAPI SEKALI BERARTI PERUBAHAN JANG SEBESAR-BESARNJA DIDALAM KEDUDUKAN POLITIKNJA.

KITA yakin bahwa kita jang kaja-raja ini djika diusahakan dengan sesungguhnya untuk meninggikan deradjat penghidupan bangsa kita serta dunia umumnja, akan masih banjak benar memberi ruangan untuk tenaga dari seluruh dunia, terutama dari Amerika Serikat, Australia dan Philipina untuk turut dalam pembangunan Negara dan Bangsa kita.

Akan tetapi sekalian itu hanya akan dapat dimulai djikalau pertentangan kedaulatan antara Belanda dan kita dapat selesai dengan pengakuan hak kita untuk menentukan nasib kita sendiri, jaitu dengan pengakuan Negara dan Pemerintahan yang telah kita pilih. Bukan sadja kita dan barangkali pihak Belanda berkepentingan dengan lekasnja terlaksanaja hal ini, akan tetapi seluruh dunia yang menunggu-nunggu sumbangan tanah bangsa Indonesia terhadap kekurangan yang ada didunia sekarang.

Dengan pengakuan kemerdekaan kita, kita akan menanggung segala yang patut kita tanggung menurut kedudukan kita. *Segala hutang Hindia Belanda sebelum penjerahan Djepang dan patut menjadi tanggungan kita, kita akui sebagai hutang kita.*

Segala milik bangsa asing selain dari pada yang diperlukan oleh Negara kita untuk diusahakan oleh Negara sendiri, dikembalikan pada yang berhak, serta yang diambil oleh Negara akan dibayar kerugiannya dengan seadil-adilnja.

Sedjadar dengan usaha persahabatan kita dengan tetangga kita serta dengan seluruh dunia, kita tidak sadja akan berchtiar suatu anggota United Nations menjtudju benar² maksud Charter United Nations, akan tetapi didalam Negeri kita akan melaksanakan kedaulatan rakjat kita dengan aturan kewarganua yang akan lekas membuat semua golongan Indo Asia dan Eropah menjadi orang Indonesia sedjati menjadi patriot dan demokrat Indonesia.

Sedikit hari lagi kita akan mengadakan pemilihan umum sebagai bukti bahwa bagi kita, tjila-tjita dan dasar kerakjatan itu benar-benar dasar dan pedoman penghidupan masjarakat dan Negara kita. Mungkin sebagai akibat pemilihan itu Pemerintah akan berganti dan Undang-Undang Dasar kita akan disempurnakan menurut kehendak rakjat kita yang terhanjak.

Terhadap rakjat dan penduduk umumnya, kita akan mendjalkan suatu rentjana kemakmuran yang besar yang mungkin memerlukan banjak kredit dari luar negeri dan djuga banjak hasil industri Amerika Serikat, Australia dan lain² Negeri yang berdagang dengan Negeri kita. Tiap² penduduk ditanggung keselamatanannya didalam berusaha, djika tidak melanggar aturan negeri, meskipun ia orang Belanda.

PERTIMBANGAN BAGI BELANDA

BAGI BANGSA DAN RAKJAT BELANDA MEMANG SEHARUSNJA MENDJADI PERTIMBANGAN YANG SUNGGUH²: APAKAH IA AKAN MENURUT NAFSU SEGOLONGAN KETJIL KAUM KAPITAL DAN PEN-

DJADJAH JANG PEMANDANGANNJA TERUTAMA DIPENGARUHI OLEH KEPENTINGANNJA SENDIRI DAN DENGAN ITU AKAN MENGORBANKAN BERIBU DJIWA PEMUDA SERTA BANJAK TENAGA BANGSA BELANDA, DIDALAM ICHTIAR JANG BEGITU BESAR RISIKONJA, JAITU MENAKLUKKAN KEMBALI BANGSA INDONESIA JANG TELAH BERDIRI, ATAU APAKAH IA AKAN MENERIMA DAN MENJESUAIKAN DIRI-NJA DENGAN PERDJALANAN SEDJARAH, MENTJARI DJALAN DAMAI SUPAJA KEPENTINGAN DAN KEPERLUAN BANGSA BELANDA JANG BEGITU BESAR DI INDONESIA INI DAPAT DISELENGGARAKAN SELANDJUTNJA, SUPAJA PUTERA-PUTERANJA DAN KETURUNANNJA JANG BERADA DISINI DAPAT PULA HIDUP DENGAN SELAMAT DIDLAM USAHA MENTJARI NAFKAHNJA.

Sedjak kita akan mendapat kesempatan jang sepenuhnja untuk memberikan seluruh tenaga kita pada pembangunan rakjat dan bangsa kita, dengan setjepat-tjepatnja kita berusaha melaksanakan hak-hak rakjat kita jang sesungguhnya sesuai dengan tjita-tjita United Nations, jaitu tidak sadja mendjadi rakjat jang merdeka menjatakan pikirannja, merdeka memilih kejakinan dan agamanja, bebas dari sewenang-wenang dan kekuatan, bebas dari kekurangan, melainkan djuga mendjadi rakjat jang sehat dan tjerdas karena adanja pengawasan kesehatan dan pendidikan jang modern untuk seluruh rakjat kita dan untuk segala lapisan penduduk.

Selaras dengan itu perhubungan kita dengan Dunia luar tidak sadja lagi akan terbatas pada pertukaran barang dan orang, akan tetapi lambat laun mendjadi pertukaran ilmu dan kebudayaan, terutama dengan tetangga-tetangga kita, lebih-lebih dengan bangsa jang sedarah dengan kita seperti bangsa Philipina. Kita pasti akan sanggup memberi sumbangan jang bagus kepada kebudayaan dunia, djika kita telah mendapat kesempatan sepenuh-penuhja sebagai bangsa jang sedjadjar kedudukannja dengan bangsa-bangsa lain didunia.

Djakarta, tanggal 1 Nopember 1945

WAKIL PRESIDEN
MOHAMAD HATTA



DRS SUSANTO TIRTOPRODJO S.H.

Tentang Sedjarah Revolusi Nasional, dikupas dan disampaikan oleh tokoh jang tatkala petjah clash kedua, turut bergerilja bersama dengan tentara dan rakjat kita.

Drs Susanto Tirtoprodjo S.H. adalah lulusan Universitas Leiden, dan sebagai mahasiswa terbaik beliau mendapat hadiah „Kanakaprijs”. Selama berpuluh-puluh tahun bergerak dilapangan pengadilan, pamongpradja dan dibidang diplomasi.

Atas djasanja jang besar itu pada tahun 1960 oleh Presiden dianugerahi bintang Mahaputera III dan bintang Gerilja.

Beliau kini mendjabat Ketua Lembaga Pembinaan Hukum Nasional.

Peminjam	no. agt	tanggal	pa
Alfiah	932663		
Subhan	96040303	15 JAN 2007	
Tutut	0274	10 MAY 1997	Stabil
Wahyu-D	0261	07 NOV 2004	
Ajje		13 SEP 2009	
Gah L		05 DEC 2009	A
Arini		05 JAN 2011	Arini
		13 MAR 2012	
		25 OCT 2012	
		20 NOV 2012	

No. 992.07 T 198 S	PENGARANG & NAMA BUKU		
Peminjam	No. Agt.	Tanggal	Paraf
Tutuk	0274	10 MAY 1997	<i>[Signature]</i>
Wahyu	0261	07 NOV 2001	<i>[Signature]</i>
Aji		30 SEP 2009	<i>[Signature]</i>
<i>[Signature]</i>	15105	05 JUL 2005	<i>[Signature]</i>
Arini	4	105 JAN 2011	<i>[Signature]</i>

992.07
T 198
S

Perpustakaan UI



01-10-07029742

33

Perpustakaan FIB UI



00015105